

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sumenep berada di ujung timur pulau Madura yang terletak diantara $113^{\circ}32'54''$ - $116^{\circ}16'48''$ Bujur Timur dan $4^{\circ}55'7''24'$ Lintang Selatan, dengan batas-batas sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura, sebelah utaraberbatasan dengan laut jawa, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Pamekasan, sebelah timur berbatasan dengan laut jawa dan laut Flores. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang luas wilayah kabupaten sumenep seluas $2.093,47 \text{ km}^2$ (209.347 Ha) terbagi menjadi 27 wilayah kecamatan, 330 Desa, 4 Kelurahan, 1.547 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RT) dengan komposisi penyebarannya terdiri dari 260 Desa dan 4 Kelurahan di wilayah daratan dan 70 Desa di wilayah kepulauan, dengan pembagian wilayah

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Kabupaten Sumenep

No.	Desa/Kel.	Kecamatan Dusun	Jumlah (Km ²)	Luas
1.	Kota Sumenep	16	40	27,84
2.	Batuan	7	23	27,10
3.	Kalianget	7	26	30,19
4.	Manding	11	49	68,88
5.	Talango	8	62	50,27
6.	Bluto	20	60	51,25
7.	Saronggi	14	54	67,71
8.	Lenteng	20	79	71,41
9.	Giligenting	8	40	30,32
10.	Guluk-Guluk	12	70	59,57

No. Desa/Kel.		Kecamatan Dusun	Jumlah (Km ²)	Luas
11.	Ganding	14	73	53,97
12.	Pragaan	14	72	57,84
13.	Pasongsongan	10	68	119,03
14.	Ambunten	15	53	50,54
15.	Dasuk	15	56	64,50
16.	Rubaru	11	37	84,46
17.	Batang-Batang	16	98	80,36
18.	Batuputih	14	78	112,31
19.	Dungkek	15	66	63,35
20.	Gapura	17	57	65,78
21.	Gayam	10	58	88,40
22.	Nonggunong	8	29	40,08
23.	Ra'as	9	38	38,90
24.	Masalembu	4	11	40,85
25.	Arjasa	19	156	241,99
26.	Kangayan	9	46	204,68
27.	Sapeken	11	48	201,89
JUMLAH		334	1.547	2.093,47

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Tahun 2015

2 Kependudukan

Jumlah penduduk di kabupaten Sumenep hingga tahun 2017 mencapai 1.117.803 jiwa. Dengan jumlah penduduk tertinggi berada pada kecamatan kota sumenep dengan jumlah 71.514 jiwa. Hal ini tidak terlepas dari peran kecamatan kota Sumenep sebagai pusat kegiatan di kabupaten Sumenep. Adapun apabila dilihat dari jenis kelamin, penduduk di sumenep didominasi oleh perempuan, yaitu sejumlah 346,416 jiwa atau sebesar 52,42% dari total jumlah penduduk. Tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Sumenep tergolong rendah. Adapun kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi adalah kecamatan kota Sumenep.

1.3 Potensi Perikanan dan Kelautan

Dari letak geografis Kabupaten Sumenep dimana sebagian wilayah merupakan wilayah kepulauan dan laut sehingga memiliki potensi yang cukup besar dari perikanan darat maupun perikanan laut, potensi perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di kabupaten Sumenep cukup besar, namun perlu adanya upaya optimalisasi sumber daya perikanan dan sumber daya manusia dengan meningkatkan sumber daya kelautan serta mengoptimalkan aktivitas kelembagaan kelompok nelayan.

Dalam rangka mendukung pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Sumenep salah satunya dilaksanakan program pengembangan kawasan Minapolitan yang merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip integritas efisiensi berkualitas dan percepatan yang dipertegas dengan Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER 32 / MEN / 2010 Tentang Minapolitan. Adapun hasil penyusunan masterplan Minapolitan dialokasikan di Kecamatan Bluto sebagai Pusat Pengembangan Minapolitan dan Kecamatan Seronggi sebagai Hinter Land (Kawasan Penyangga). maka potensi pengembangan wilayah di bidang perikanan dan kelautan berdasarkan jumlah produksi komoditasnya dapat dilihat secara terinci pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Potensi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015

No	KOMUDIT I	PRODUKSI (TON)					WILAYAH SENTRA PRODUKSI
		2011	2012	2013	2014	2015*	
1	Ikan Kerapu	2.015,19	1.956,40	1.968,90	1.991,90	69,27	Sapeken, Kandangan

2	Udang/ Lobster	1.10 9,80	1.442,1 5	1.137, 10	1.158, 70	1.269,7 0	Arjasa,Kang ayan, Sapeken,Mas alembu, Raas, Gayam
3	Rumput Laut	575. 490, 01	578.20 0,05	569.6 51,41	583.6 97,05	562.12 2,90	Sapeken,Blut o,Saronggi,T alango,Dung kek
4	Bandeng	303, 60	308,15	357,8 5	368,7 6	369,25	Kalianget, Saronggi
5	Kakap Merah	2.49 9,50	2.435,4 0	2.398, 10	2.321, 70	2.681,2 0	Arjasa,Kang ayan, Sapeken,Mas alemb,Raas, Gayam.
6	Udang Windu	96,8 0	98,74	99,42	97,12	80,69	Kalianget, Saronggi
7	Lele	103, 85	112,44	124,7 2	131,7 1	66,99	Bluto,Kota,S aroggi, Pragaan,Lent eng, Kalianget

Sumber : BPS dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, 2015
*) data tahun 2015 adalah data sementara

Produksi rumput laut merupakan yang terbesar di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dengan produksi mencapai 575.490,01 Ton pada tahun 2011 dan meningkat hingga mencapai 562.123 Ton pada tahun 2015. Produksi terbesar kedua setelah rumput laut yaitu kakap merah mencapai 2.499,50 Ton pada tahun 2011 namun terus menurun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan hingga mencapai 2.681,20 Ton pada Tahun 2015.

Produksi kerapu juga menurun dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dengan produksi mencapai 2.015,19 Ton pada tahun 2011 terus menurun hingga mencapai 69,27 Ton pada tahun 2015. Produksi udang/lobster mencapai

1.109,80 Ton pada tahun 2011 dan meningkat mencapai 1.269,70 Ton pada tahun 2015, sedangkan produksi udang windu mencapai 96,80 Ton pada tahun 2011 dan meningkat mencapai 80,16 Ton pada tahun 2015.

Tabel 4.3
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015

Komoditi		2011	2012	2013	2014	2015
a	Tangkap (ton)	44.494,80	44.697,70	45.798,65	46.737,84	46.739,50
b	Budidaya (ton)	535.787,40	551.103,43	571.027,42	585.121,21	600.792,99

Sumber : BPS dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, 2015

Berdasarkan tabel di atas peningkatan hasil produksi terjadi setiap tahunnya di bidang tangkap maupun budidaya. Pada tahun 2015 saja sudah mencapai 46.739,50 ton untuk tangkap dan 600.792,99 ton untuk budidaya.

B. Hasil Penelitian

1. Potensi Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumenep

Kebutuhan ikan dunia maupun nasional akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan populasi penduduk dunia maupun penduduk Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan pangan ikan ini, harus dikelola dengan cara yang tepat, arif dan bijaksana. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus benar-benar mendapat perhatian yang serius supaya dalam pengelolaannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan meningkatkan produktifitas tidak merusak lingkungan dan sumberdaya ikan, artinya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Usaha perikanan telah menjadi sumber kehidupan sebagian masyarakat Kabupaten Sumenep. Usaha perikanan laut dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di bagian selatan atau daerah pesisir pantai. Keberadaan pelabuhan perikanan dari skala kecil (Pangkalan Pendaratan Ikan) hingga skala besar (Pelabuhan Perikanan Samudera) berada di wilayah selatan Sumenep menjadi bukti adanya aktifitas perikanan laut. Namun, aktivitas penangkapan ikan oleh sebagian nelayan Sumenep dilakukan dengan sistem *one day fishing*, penggunaan alat tangkap dan teknologi tergolong sederhana dengan daerah penangkapan (*fishing ground*) hanya sekitar 3 mil dari pantai.

Potensi perikanan darat diidentikkan dengan adanya usaha perikanan budidaya oleh masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi atau jauh dari daerah pesisir. Usaha budidaya di Kabupaten Sumenep sendiri tidak hanya dilakukan melalui usaha budidaya ikan air tawar. Namun, saat ini potensi budidaya perikanan laut atau air payau seperti budidaya rumput laut (*Spinifex littoreus*) dan budidaya ikan kerapu (*Epinephelus pachycentru*) yang juga ada di Kabupaten Sumenep mulai “dilirik” oleh masyarakat. Berikut penjelasan narasumber ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya terkait hal tersebut:

“Kalau di Kabupaten Sumenep sendiri ya mbak potensi perikananannya banyak kan komoditas keunggulannya itu dominan ikan laying dan ikan karang. Namun, ada juga udang, faname, bandeng dan kerapu. Nah jenis ikannya hampir semua ada kok di sumenep cuma yang nilai ekonomisnya cukup tinggi itu ya bandeng dan kerapu” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Gambar 4.1 Hasil Panen Ikan di Kabupaten Sumenep



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep ini sangat baik dalam mengembangkan tingkat perekonomian masyarakat sendiri khususnya tingkat penghasil yang bias dimiliki setiap nelayan maupun petambak ikan. Potensi perikanan yang dimiliki meliputi perikanan laut dan perikanan darat (budidaya) dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain banyaknya potensi perikanan yang dimiliki oleh kabupaten Sumenep di bidang perikanan yang lain juga ada potensi sumber daya manusia yang berkembang. Dijelaskan dalam hasil wawancara Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati berikut ini:

“Banyaknya nelayan serta petambak garam di Sumenep tentu akan membawa dampak positif dalam potensi perekonomian Sumenep sendiri. Dengan adanya nelayan dan petambak garam maka dapat berkembang sebuah budidaya ikan laut yang tentunya akan mendatangkan tingkat perekonomian yang baik bagi masyarakat sekitar” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Gambar 4.2. Para Petambak garam Kabupaten Sumenep



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep dapat dioptimalkan melalui pendekatan pengembangan wilayah dengan menciptakan konektivitas hulu hilir usaha perikanan. Minapolitan menjadi salah satu alternatif solusi untuk pengembangan wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, Minapolitan dimaknai sebagai konsep pembangunan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dengan berbasis kawasan yang terintegrasi, mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan potensi yang ada dengan memperhatikan asas demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan yang pro rakyat, keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil, serta penguatan peranan ekonomi daerah.

Kabupaten Sumenep mempunyai banyak pulau kecil berbentuk gugusan pulau. Dari 25 kecamatan, 9 diantaranya memiliki pulau. Sebanyak 48 pulau telah berpenghuni, sisanya (78 pulau) belum berpenghuni dan atau tidak layak

huni. Dengan demikian jumlah pulau di kabupaten ini sekitar 126 pulau. Pulau terjauh yang berada di wilayah paling utara adalah Pulau Keramaian (Kecamatan Masalembu) yang berjarik ±151 mil dari Pelabuhan Kalianget (Sumenep daratan). Sedangkan pulau yang berada di wilayah paling timur adalah Pulau Sekala (Kecamatan Arjasa) yang berjarak ±165 mil dari Pelabuhan Kalianget.

Hal ini tentu akan mengindikasikan bahwa Kabupaten Sumenep dapat disebut dengan kabupaten kepulauan. Karena itu, tak salah bila daerah ini mempunyai karakteristik unik, yakni kehidupan penduduknya tidak jauh dari sektor kelautan dan perikanan, terutama di dacmh kepulauan. Dalam skema pengembangan Madura, Kabupnten Sumenep dipersiapkan sebagai tujuan wisata, perikanan, peternakan dan industri penggaraman. Dengan ditunjang lingkungan biofisik dan posisi yang strategis. Struktur perekonomian kabupaten ini didominasi sector kelautan, pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa.

Potensi yang sangat besar tersebut kemudian mendorong pemerintah Kabupaten Sumenep melalui dinas kelautan dan perikanan membuat RPJMD terkait Kegiatan Minapolitan. Hal tersebut karena pada wilayah Kecamatan Saronggi memiliki potensi rumput laut maupun budidaya kelautan dan perikanan. Hasil budidaya dari kepulauan maupun dari wilayah lainnya di Sumenep diharapkan tetap bisa ditampung disana dan dapat mengelola kebutuhan petani rumput laut dari hilir hingga hulu. Kecamatan Saronggi di Kabupaten Sumenep berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

No.35/Kepmen – KP/2013 telah ditetapkan menjadi kawasan Minapolitan Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/MEN/2010. Untuk sebuah kawasan minapolitan, pemerintah daerah perlu menyiapkan beberapa persiapan yaitu Rencana Induk. Rencana induk ini mencakup konsep arah kebijakan pengembangan kawasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak

Maksud dari kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep adalah untuk menyiapkan Master Plan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dalam rangka rencana pengembangan berbasis kawasan. Tujuan dari kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep adalah untuk menghasilkan dokumen Master Plan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sebagai acuan perencanaan yang lebih detail termasuk proyeksi arah, skenario dan tahapan pengembangan kawasan minapolitan dalam jangka menengah. Adapun penyusunan tersebut memiliki tujuan dan sasaran:

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang lengkap, tepat dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan di lapangan pada kawasan Minapolitan di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
2. Tersedianya rencana sarana dan prasarana kawasan dan pendukung Minapolitan di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep secara terperinci.

3. Tersusunnya pedoman atau dokumen dalam perencanaan kawasan Minapolitan di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sehingga lebih efektif dan efisien.
4. Tersusunnya pembiayaan dan program pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur pendukung Minapolitan di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Kontribusi paling besar berasal dari sektor pertanian khususnya sub sektor perikanan dan kelautan. Di antara budidaya laut yang potensial terdapat di perairan Sumenep adalah rumput laut (*Echeume cottonii*). Hasil perikanan laut yang potensial di perairan Sumenep adalah teri nasi yang berorientasi ekspor. Komoditas unggulan ekspor lainnya adalah ikan kerapu, ikan hias, teripang dan lobster dengan negara tujuan ekspor Jepang, Hongkong, Singapura dan Korea Selatan. Selain komoditi tersebut, perairan Sumenep juga mempunyai potensi yang cukup tinggi hasil- hasil perikanan lainnya, seperti ikan layang, tongkol, kembung, tengiri, cumi-cumi, lemuru, bambangan, peperek, kakap merah, udang dan kepiting. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya berikut ini :

“Jenis ikannya disini banyak sekali apalagi ikannya berasal dari banyak jenis yaitu ikan air tawar, ikan air payau dan ikan air laun. Seperti ikan layang, tongkol, kembung, tengiri, cumi-cumi, lemuru, bambangan, peperek, kakap merah, udang dan kepiting. Kalau masalah yang masih banyak itu ikan layang mbak” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Kabupaten Sumenep adalah salah satu dari wilayah di Indonesia yang memiliki potensi kelautan cukup tinggi. Diketahui bahwa potensi kelautan Indonesia sangat besar dan beragam, yakni memiliki 17.508 pulau dengan

panjang garis pantai 81.000 km dan 5,8 juta km² laut atau sebesar 70% dari luas total Indonesia. Potensi tersebut tercermin dari besarnya keanekaragaman hayati, potensi budidaya perikanan pantai, laut dan pariwisata bahari. Tetapi sayangnya baru sebagian kecil saja potensi yang dimanfaatkan. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya berikut :

“Misalnya nih di Sumenep sendiri kan banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan nah salah satunya ya kelautan dan perikanan kan makanya kenapa potensi yang diunggulkan adalah komoditi ikan laut salah satunya adalah rumput laut. Komoditi unggulan ini tentu membawa nilai jual yang cukup tinggi pula mbak.” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Gambar 4.3 Hasil Panen Rumput Laut Kabupaten Sumenep



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Melimpahnya sumberdaya perikanan dan dengan karakteristik wilayah laut yang luas, wajar banyak penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Hal ini tentu akan membawa dampak atau pengaruh pada keadaan perekonomian . Dalam hal perekonomian, Kabupaten Sumenep berada dalam titik perkembangan struktur ekonomi yang bisa ditunjukkan oleh peranan atau

kontribusi tiap sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Salah satunya melalui budidaya ikan yang dilakukan para masyarakat Kabupaten Sumenep.

Kabupaten sumenep yang teletak paling timur pulau madura yang memiliki kekayaan alam yang melimpah Kabupaten Sumenep sebagai daerah kepulauan dengan 126 buah pulau besar, kecil dan sangat kecil mempunyai kedudukan dan posisi strategis dalam integrasi ekonomi wilayah dan sosio-demografi di Pulau Madura, terutama untuk mendukung Sumenep sebagai pusat Sub Wilayah (SWP) Madura yang dipersiapkan sebagai daerah tujuan wisata, perikanan, peternakan dan industri penggaraman. Keadaan lingkungan biofisik dan posisi yang strategis ini memungkinkan struktur perekonomian Kabupaten Sumenep didominasi oleh sektor kelautan, pertanian, perdagangan. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati berikut ini :

“Sumenep ini lokasinya sangat bagus mbak banyak potensi yang bisa dikembangkan salah satunya ya sektor perikanan dan kelautan. Namun di sisi lain juga ada sector didominasi lain untuk Kabupaten Sumenep yaitu sector pertanian dan perdagangan. Nah dari perikanan dan kelautan itulah dikembangkan jadi sector perdagangan melalui usaha budidaya ikan air laut” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Ditengah potensi tersebut Kabupaten Sumenep diharapkan bisa dan dapat untuk memproyeksikan program dalam rangka mensejahterakan masyarakat , tetapi dengan sistem birokrasi yang sulit dan penguasaan monopolitistik perusahaan-perusahaan besar yang memiliki akses dan modal yang besar sehingga persaingan usaha sehingga tidak kompetitif dan usaha kecil terpaksa tidak berkembang dan mati dengan sendirinya, sehingga perlu diketahui bahwa

sesuai dengan kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, penciptaan kesempatan kerja tidak mungkin hanya mengandalkan dari pengembangan usaha besar saja. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara kepada Staf Bidang Pengawasan bapak Supeno berikut ini:

“ Potensi perekonomian yang ada di Kabupaten Sumenep itu cukup berkembang kalau bisa dimaksimalkan nah semua kan tergantung sama masyarakatnya sendiri dan terbukti sampai sekarang potensi ekonomi itu bias berkembang dengan upaya pembudidaya dari nelayan sendiri dimana ada budidaya tangkap ikan dan rumput laut soalnya itu komoditi unggulan yang bias diperluas lagi. Dengan adanya upaya budidaya seperti ini artinya penciptaan kesempatan kerja bias dilakukan secara mandiri dampaknya pada perekonomiannya” (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Penciptaan kesempatan kerja dapat juga dilakukan melalui pengembangan usaha mandiri dan usaha keluarga, serta usaha-usaha kecil dan menengah. Untuk itu sebagian besar angkatan kerja perlu dipersiapkan dengan kemampuan kewirausahaan supaya dapat bekerja mandiri dan atau membangun usaha keluarga dan usaha kecil serta menengah. Pembangunan dan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah ini akan mampu mendorong tersedianya lapangan kerja yang berdampak kepada menurunnya pengangguran. Selain itu, usaha kecil dan menengah pun dapat menjadi motor pertumbuhan baru, dengan laju pertumbuhan tinggi meskipun produktivitas per pekerjaannya masih terbilang rendah. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya berikut ini :

“Istilahnya usaha budidaya ini adalah usaha kecil menengah meskipun laju pertumbuhannya tidak tinggi pertumbuhannya namun tingkat produktivitasnya sangat baik karena petambak dan nelayan ikan bias melakukan pekerjaannya hampir setiap hari sehingga tingkat produksinya bias berkembang lebih baik” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Wilayah Kabupaten Sumenep memiliki banyak wilayah kepulauan dengan potensi kelautan dan perikanan yang bagus. Dan berbagai potensi lainnya yang dimiliki Sumenep untuk terus dikembangkan dan dikelola dengan baik agar menghasilkan peluang yang luar biasa pula.

Sumenep merupakan salah satu dari empat Kabupaten di Pulau Madura dengan populasi penduduk terbesar diantara tiga kabupaten lainnya yakni 1,06 juta jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Pamekasan sebesar 827,4 ribu jiwa. Selain itu Sumenep juga merupakan salah satu Kabupaten dengan wilayah yang khas bukan hanya di Madura namun juga di Jawa Timur dengan budaya keraton serta geografis kepulauannya. Hal ini dilihat dari hasil laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2016.

Dari sisi ekonomi, Perjalanan pembangunan Sumenep seiring dengan kabupaten lainnya, bahkan di tahun 2016 disaat kabupaten lainnya mengalami perlambatan ekonomi Sumenep satu-satunya Kabupaten di Madura yang tidak mengalami perlambatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumenep cukup tinggi melalui sector perikanan dan kelautan yang dimiliki.

Potensi perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di Kabupaten Sumenep cukup besar, namun perlu adanya upaya optimalisasi sumber daya perikanan dan sumber daya manusia dengan meningkatkan sumber daya kelautan serta mengoptimalkan aktivitas kelembagaan kelompok

nelayan. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati berikut ini:

“Dengan banyaknya potensi keunggulan yang dimiliki bertujuan untuk memperkuat kelembagaan kelompok dan koperasi. Kemudian juga bertujuan untuk memfasilitasi hasil produksi perikanan yang dihasilkan oleh nelayan dan petambak” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Dalam rangka mendukung pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Sumenep salah satunya dilaksanakan program pengembangan kawasan Minapolitan yang merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip integritas efisiensi berkualitas dan percepatan yang dipertegas dengan Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER 12 / MEN / 2011 Tentang Minapolitan. Adapun hasil penyusunan masterplan Minapolitan dialokasikan di Kecamatan Bluto sebagai Pusat Pengembangan Minapolitan dan Kecamatan Seronggi sebagai Hinter Land (Kawasan Penyangga). Djelaskan dalam hasil wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya sebagai berikut:

“pengembangan potensi dan keunggulan ekonomi local yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para nelayan dan masyarakat sendiri di sekitar” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Mengingat besarnya potensi wilayah perairan Indonesia untuk meningkatkan budidaya rumput laut, maka pemerintah hendaknya berupaya untuk meningkatkan ketrampilan petani dalam hal tehnik budidaya, pengolahan dan pemasaran, dengan sentuhan teknologi ramah lingkungan agar dapat menghasilkan rumput laut yang berkualitas tinggi. Dukungan pemerintah tentang budidaya rumput laut terbukti dengan adanya berbagai bentuk kegiatan

yang bertujuan meningkatkan dan menumbuhkembangkan rumput laut agar produksinya memiliki kualitas yang baik sehingga mampu bersaing di pasaran dunia. Untuk itu diperlukan kegiatan pemetaan terhadap komoditi rumput laut agar mampu mengestimasi seberapa besar potensi pengembangan komoditi rumput laut di tiap wilayah.

Rumput laut merupakan salah satu komoditas hasil laut yang penting. Di samping banyak kegunaannya, rumput laut juga sebagai penghasil devisa Negara dengan nilai ekspor yang terus meningkat setiap tahun. Mengingat besarnya potensi wilayah perairan Indonesia untuk meningkatkan budidaya rumput laut, maka pemerintah hendaknya berupaya untuk meningkatkan ketrampilan petani dalam hal tehnik budidaya, pengolahan dan pemasaran, dengan sentuhan teknologi ramah lingkungan agar dapat menghasilkan rumput laut yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itulah diperlukan sebuah strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Program Minapolitan.

Budidaya rumput laut di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Sentra produksi rumput laut yang sudah berkembang secara maksimal di Indonesia baru terdapat di wilayah Bali, NTB dan Sulawesi Selatan. Sedangkan perairan Jawa Timur dan Maluku masih merupakan potensi penting yang belum terolah secara luas dan berhasil guna. Namun, untuk daerah Jawa Timur lokasi potensial bagi pengembangan budidaya rumput laut adalah Pacitan, Banyuwangi dan Sumenep. Budidaya rumput laut memiliki peranan penting dalam usaha meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan

gizi serta memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan petani serta menjaga kelestarian sumber hayati perairan. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara Staf Bidang Pengawasan bapak Supeno berikut ini :

“Menurut undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang budidaya dan penangkapan untuk nelayan kecil ya di Sumenep jenis ikannya hamper semua ada Cuma komoditas keunggulannya memang rumput laut, layang dan karang. Nah dengan banyaknya komoditas ikan tersebut maka ada sebuah koperasi nelayan yang tinggal di pesisir makanya strateginya dilakukan melalui fasilitas pemasaran” (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Gambar 4.4 Kantor Sekretariat Koperasi Bersama Jaya di Kabupaten Sumenep



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dalam seluruh uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi terbesar yang ada di Kabupaten Sumenep berasal dari sector perikanan dan kelautan. Namun, disisi lain adapula sector perdagangan, pertanian dan industri yang menjadi potensi ekonomi lain di Kabupaten Sumenep.

2. Strategi Pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Program Minapolitan

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan salah satu kecenderungan baru dalam paradigma pembangunan di Indonesia setelah sekian lama wilayah laut dan pesisir menjadi wilayah yang terabaikan dan dilupakan dalam pembangunan di Indonesia. Masyarakat pesisir dikenal memiliki karakteristik yang cukup unik dan memiliki keragaman potensi sumberdaya alam baik hayati maupun non-hayati yang sangat tinggi. Potensi sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di wilayah tersebut untuk mencapai kesejahteraannya baik dari sektor perikanan maupun diluar sektor perikanan.

Pulau Madura khususnya Kabupaten Sumenep memiliki penduduk yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun hingga kini produktivitas perikanan di Madura masih rendah yang disebabkan oleh adanya fenomena over fishing yang selama ini terjadi. Semakin banyaknya jumlah nelayan tangkap namun terkadang tidak diimbangi dengan jumlah hasil tangkapan yang akhirnya berujung pada makin rendahnya tingkat pendapatan nelayan sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya berikut ini:

“Ya kalau nelayan yang tangkap ikan banyak ya otomatis kan hasil lautnya juga banyak nah dengan banyaknya hasil tangkapan ikan kan tentunya produksi ikan biosa lebih meningkat lagi otomatis bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sebuah upaya budidaya. Nah gimana caranya maka hal ini tujuan PEMDA sendiri dalam memberdayakan masyarakat melalui sebuah strategi” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Tujuan utama sebuah pemberdayaan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar atas pengelolaan sumber daya alam yang ada. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi,

Melihat kurang optimalnya pengelolaan hasil perikanan di Kabupaten Sumenep ini tentu menjadi sebuah permasalahan bagi Pemerintah sehingga dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan menjawab tantangan sektor perikanan, diperlukan kebijakan strategis yang inovatif dan langkah - langkah terobosan yang efektif. Pada tatanan implementatif diperlukan sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep minapolitan.

Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip - prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan atau kegiatan pendukung lainnya Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati berikut ini, yaitu:

“Jadi wilayah Sumenep ini dirancang menjadi kawasan minapolitan dimana berbagai fungsi perekonomian dilakukan dalam pengelolaannya mulai

sentra produksi, kemudian usaha budidaya yang berasal dari pengolahan baru kemudian diperdagangkan pada komoditas perikanan. Nah kemudian Koperasi jadi lembaga yang ikut membantu dalam pelaksanaan program” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Besarnya komoditi rumput laut sebagai komoditi unggulan daerah Sumenep menjadikan sebuah lahan produksi bagi masyarakat sekitar sendiri. Hal ini tentu menjadi langkah strategis bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan kawasan minopolitan sehingga Sumenep tidak hanya terkenal di sisi pariwisata saja namun juga sentra perikanan serta kelautan.

Sebagai upaya mendongkrak kembali pertumbuhan ekonominya, Pemerintah Kabupaten Sumenep mencanangkan program ”Minopolitan” dimana salah satu tujuannya adalah pembangunan berbasis pemberdayaan bagi masyarakat sekitar yang mayoritas bermaya pencaharian sebagai nelayan dan petambak ikan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan semua sektor pembangunan harus dibangun secara integratif di bawah koordinasi pemerintah bersangkutan, maka dapat diharapkan prasarana dan sarana perikanan dan kelautan serta berbagai fasilitas umum dapat tertata dengan lebih baik. Oleh sebab itulah maka diperlukan pengembangan di bidang perikanan dan kelautan ini dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat disebabkan potensi ekonomi lokal sebagian besar masyarakat perdesaan di Indonesia adalah mata pencaharian nelayan. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya berikut ini:

“Ada mbak beberapa strategi yang dilakukan sama pemerintah kabupaten Sumenep sendiri yang pertama pengembangan sumber daya manusia, pengembangan serta kelembagaan kelompok, pemberian modal usaha,

kelengkapan sarana prasarana juga diberikan bantuan, serta penyediaan informasi tepat guna” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

**Gambar 4.5 Acara Kunjungan Kerja Pinjaman Modal Usaha di
Kabupaten Sumenep**



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan untuk dapat memberdayakan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumenep untuk merubah kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka sehingga mereka mempunyai akses pada sumber - sumber ekonomi. Usaha memberdayakan masyarakat serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah perdesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan dan pembangunan perdesaan masih relevan untuk ditempatkan pada prioritas kebijaksanaan. Berikut ini akan diuraikan satu persatu mengenai strategi pemerintah daerah kabupaten sumenep dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program minapolitan, yaitu:

1. Pengembangan Sumber daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan potensi yang baik dalam pemberdayaan masyarakat daerah Kabupaten Sumenep sendiri. Sumber

daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah lembaga, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Hal inilah yang juga terjadi di lingkungan Kabupaten Sumenep, dimana nelayan dan petambak ikan merupakan sumber daya manusia yang cukup berpotensi untuk strategi Pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Berikut hasil wawancara Staf Bidang Pengawasan bapak Supeno dengan peneliti :

“Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia adalah melalui pelatihan dan pengembangan produksi budidaya dengan diberikan stimulan berupa dana modal usaha dalam kewenangan budidaya di kawasan Minopolitan” (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Pelatihan adalah proses meningkatkan keterampilan sumber daya manusia salah satunya meliputi pengubahan sikap sehingga dapat melakukan pekerjaan yang lebih efektif. Pelatihan secara spesifik berfokus pada memberi keterampilan khusus atau membantu sumber daya manusia memperbaiki kekurangannya dalam kinerja. Proses pelatihan difokuskan pada pelaksanaan pekerjaan dan penerapan pemahaman serta pengetahuan pada pelaksanaan tugas tertentu. Umumnya hasil yang diinginkan dari pelatihan ialah penguasaan dan peningkatan keterampilan.

Dalam konteks penelitian ini pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan bagi para nelayan untuk memiliki ketrampilan lebih di luar penangkapan ikan di musimnya saja namun juga pelatihan untuk pembibitan, pembenihan, pengolahan dan pembudidaya. Hal ini tentu akan menjadi modal bagi sang nelayan dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tujuan dasar dari adanya pengembangan sumber daya manusia ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Sumenep yang bukan hanya sebagai kawasan minapolitan di sektor perikanan bisa pula dikembangkan dalam usaha budidaya. Hal ini tentu juga akan berdampak pada sistem kelembagaan kelompok serta koperasi hasil produksi para nelayan. Berikut uraian hasil wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya:

“Kalau tujuannya sendiri ya untuk memperkuat kelembagaan kelompok dan koperasi serta memfasilitasi pemasaran hasil produksi perikanan”

Untuk menunjang keberhasilan serta keberlanjutan sebuah usaha sangat dibutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia sebagai sumber prinsipal tenaga kerja. Untuk itu jumlah dan kualitas sumberdaya manusia perlu ditelusuri secara cermat terkait dengan perencanaan pengembangan usaha perikanan rumput laut. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan dari kegiatan dalam program Minopolitan di Kabupaten Sumenep sendiri bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat sendiri khususnya di bidang perekonomian. Diuraikan dalam wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati berikut ini :

“Tercatat dalam data kalau sampai tahun 2016, persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor perikanan Kabupaten Sumenep itu sebanyak 66,18%. Oleh karena itu mengapa kalau pemberdayaan berusaha dikembangkan dalam masyarakat supaya hasil produksi para nelayan itu memberikan manfaat khususnya di bidang perekonomian. Selama ini diketahui kalau penangkapan ikan oleh nelayan itu dilaksanakan sesuai musimnya sehingga perlu sekali hasil produksinya dibudidayakan sebagai komoditas unggulan Sumenep ya salah satunya Rumput laut tadi” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat di kabupaten Sumenep umumnya dan khususnya angkatan kerja pada bidang perikanan dan kelautan sebagai sektor primer masih cukup besar. Dengan demikian pengembangan cabang-cabang usaha yang berbasis pertanian termasuk perikanan masih merupakan tuntutan yang harus terus dikembangkan kedepan. Hal ini menjadi factor utama dimana perkembangan Sumber Daya Manusia memang harus dilakukan demi terciptanya sebuah kualitas yang unggul. Dijelaskan dalam hasil wawancara Staf Bidang Pengawasan bapak Supeno sebagai berikut:

“Banyaknya rencana yang dilakukan oleh Dinas sendiri ya tentu inginnya tetap punya manfaat mbak khususnya mnafaat bagi kualitas unggul SDM Sumenep sendiri jadi istilahnya nelayan punya nilai yang berkualitas dalam mata pencahariannya” (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Sumber Daya Manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di Internasional.

Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya (*resources*) alam yang melimpah dan kaya khazanah kebudayaan. Apabila SDA yang melimpah seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sektor industri (home industri) lainnya dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (daya beli) masyarakat Sumenep. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai.

Bagi masyarakat Kabupaten Sumenep, persoalan kesejahteraan ini sangat penting, karena jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi trend terjadinya proses pendalaman dan tekanan kemiskinan cenderung meningkat. Untuk itu, dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang dikelola dengan baik, dan ditambah lagi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, itu semua niscaya akan dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global seiring diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas: MEA dan AFTA. Maka upaya tersebut dikelola dinas pemerintah daerah dengan semaksimal mungkin melalui pengembangan sumber daya manusia secara maksimal.

Kabupaten Sumenep sebagai Kabupaten yang berkawasan Minapolitan memiliki latar belakang etnik yang berbeda. Latar belakang etnik ini merupakan suatu potensi mengingat masyarakat Kabupaten Sumenep sendiri terkenal dengan ketangguhannya sebagai pelaut dan bahkan dikenal sebagai salah satu ikon etnik maritim. Mata pencarian sebagai nelayan sudah menjadi tradisi yang sangat kuat dan berlangsung turun-temurun bagi masyarakat Sumenep.

Mereka relatif memiliki daya tahan (*resilience*) dalam konteks persaingan maritim. Masyarakat Kabupaten Sumenep cukup terbuka untuk membentuk pola pergaulan sosial dengan golongan manapun. Rata-rata masyarakat cukup ramah, terbuka, dan mampu bekerjasama dengan orang

baru. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya berikut ini, yaitu:

“Pola kerjasama dan budaya gotong royong masih ada, meskipun pada konteks tertentu mulai terpengaruh dengan aspek ekonomi. Misalnya kalau pada nambak ikan dilaut ya sendiri-sendiri, budidaya ya juga tapi kalau masalah gotong royong bersih-bersih ya saya akui baik sekali masyarakatnya kalau kerjasama dan system adatnya masih lumayan kuat jadi ya daerahnya dijaga betul kualitasnya” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Gambar 4.6 Kegiatan Gotong Royong Hasil Tangkap



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Adanya keterlibatan, kesadaran untuk berkerjasama, partisipasi aktif, dan inklusifitas atau keterbukaan masyarakat merupakan modal penting dalam upaya pengembangan suatu masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep cukup beragam namun mampu menampakkan potensi keunggulan daerahnya melalui program Minapolitan.

Merujuk pada sebuah keterlibatan untuk bekerja sama tentu dalam strategi pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Sumenep tidak akan bekerja secara mandiri tanpa bantuan dari instansi terkait lainnya.

Adapun instansi terkait tersebut ikut membantu proses pengelolaan pengembangan kawasan Minapolitan sendiri, berikut hasil wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati sebagai berikut:

“Kalau ditanya selain dinas siapa saja yang terlibat ya banyak mbak kan bagiannya sendiri-sendiri kalau bagian pemasaran ya dinas perdagangan, kalau bagian koperasi ya dinas koperasi kalau bagian industry ya dinas perindustrian terus kalau perikanan ya bagian dinas perikanan. Semua ada jobdisknya sendiri-sendiri kok” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Pada hakikatnya sebuah pengembangan SDM sangat penting dan diperlukan oleh segenap wilayah tertentu yang berakibat padapeningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sendiri. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat yang menjadi suatu bagian strategi dan program pemerintah. Salah satu tujuan dari adanya pemberdayaan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat berperan penting dalam terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat dalam memiliki kesejahteraan sosial sebagai Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, keusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat.

Pemberdayaan SDM ; merupakan langkah peningkatan kualitas SDM baik dalam konteks pola sikap dan perilaku, keterampilan, kemampuan manajerial, maupun aspek gizi. Salah satu langkah yang perlu dikembangkan dan mesti diteruskan adalah pelatihan kredit mikro sistem

grameen bank. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen organisasi masyarakat pesisir serta untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan kelompok dalam penyediaan modal usaha. Diharapkan terjadi peningkatan kualitas nelayan dalam manajemen organisasi nelayan, mengakses modal usaha, serta tumbuhnya kesadaran nelayan tentang pentingnya modal usaha melalui mekanisme tabungan kelompok. Ini merupakan entry point menanggulangi kemiskinan kultural dikalangan nelayan.

a. Pemberian Modal Usaha

Pengelolaan sumberdaya perikanan seringkali menempatkan komunitas nelayan miskin sebagai obyek sasaran kebijakan pemerintah yang tidak pernah melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan sumberdaya perikanan. Kebijakan pemerintah mulai dari kegiatan pra produksi, penangkapan, budidaya ikan, pasca panen sampai pada dukungan kegiatan lainnya seperti pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan, akses terhadap jasa lembaga keuangan, teknologi, penyuluhan, aspek pemasaran dan kelembagaan tidak pernah mengikutsertakan masyarakat nelayan.

Berbagai kebijaksanaan itu juga tidak pernah mempertimbangkan keberadaan pluralitas komunitas masyarakat nelayan, baik yang menyangkut alat tangkap, jumlah ABK, struktur hubungan kelompok kerja, wilayah tangkap, status penguasaan dan jenis sumberdaya yang diinginkan, kemudian antara nelayan lokal dan pendatang serta pluralitas etnis. Hal ini

juga terjadi di Kabupaten Sumenep sendiri, yaitu seperti wawancara Staf

Bidang Pengawasan bapak Supeno:

“Banyak kebijakan baru yang memang membuat pemda sendiri harus banyak mempertimbangkan sakah satunya itu masalah stimulant yang hrus sdiberikan pada paranelaya sebagai modal. Hal ini jad satu strategi paling interaktif dimana masyarakat diberikan modal melalui koperasi. Namun kadang, koperasi memiliki pemahaman yang kurang terhadap pluralitas komunitas nelayan menyebabkan seringkali setiap upaya pengembangan perikanan tidak menyentuh sasaran program (target group) artinya pemberian stimulannya kadang tidak pas sesuai kebutuhan” (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Pengembangan pemberian modal usaha bagi masyarakat adalah sebuah solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk melepaskan nelayan dari kondisi keterbelakangan, kemiskinan dan keterasingan. Pengembangan pemberian modal usaha juga dapat digunakan untuk mengatasi kelangkaan institusi permodalan yang benar-benar memihak pada nelayan miskin-nelayan yang selalu menghadapi kesulitan mencari modal untuk pengembangan usaha. Masyarakat diberikan sebuah modal usaha untuk dapat mengembangkan hasil produksinya sehingga hal ini menjadi sebuah strategi positif bagi pemberdayaan masyarakat sendiri. Berikut uraian narasumber ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya dalam hasil wawancaranya:

“Ya kita beri permodalan dan para konsumen yaitu nelayan wajib untuk mengembalikan secara cicilan. Ini dibawah lembaga koperasi jadi semua nelayan yang terlibat koperasi akan berkesempatan dapat modal itu tadi. Pemerintah selalu menyediakan tapi masyaraka. Namun pada pelaksanaannya tidak lancar dalam pengembaliannya sehingga tidak sesuai dengan perjanjiannya” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dikembangkan dan dikelola sumberdaya yang tersedia. Salah satu sumberdaya alam potensial yang dapat menunjang pembangunan tersebut adalah sumberdaya perikanan. Perikanan sebagai bagian integral dari sektor pertanian, dalam pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan kontribusi sub-sektor perikanan dalam penanggulangan berbagai permasalahan nasional di bidang pertanian (perikanan), antara lain meningkatkan devisa negara, menjamin tersedianya bahan pangan protein hewani, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan/petani ikan. Salah satu strategi meningkatkan pendapatan nelayan adalah adanya pemberian stimulant yang merata pada setiap sector dagang. Berikut uraian hasil wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati:

“Bantuan yang diberikan ya pasti ada hanya berupa stimulant berupa pemberian modal usaha yang bertujuan supaya mereka giat melaksanakan pembudidayaan dan pemasaran” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Alternatif yang dilakukan nelayan adalah dengan melakukan kegiatan di luar usaha perikanan, namun umumnya berproduktivitas rendah, yang disebabkan faktor nelayan itu sendiri maupun akibat kesempatan kerja yang terbatas. Pada golongan ini banyak nelayan yang hanya dapat mengandalkan pada uang pinjaman untuk keperluan konsumsi maupun kegiatan produksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rumahtangga nelayan menghadapi persoalan yang kompleks dalam hubungannya sebagai pengambil keputusan

dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan seringkali rumahtangga nelayan dihadapkan pada masalah kekurangan modal.

Untuk mengatasi masalah permodalan tersebut pemerintah menempuh suatu kebijakan untuk membantu modal bagi nelayan melalui pemberian bantuan kredit. Pemberian kredit untuk sub sektor perikanan dalam hal ini dilakukan melalui kredit nelayan dengan pola Kredit Ketahanan Pangan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep33/Men/2001. Saat ini pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir untuk mengatasi masalah kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya. Program ini berupa bantuan dana untuk pembiayaan pengadaan alat-alat bantu dan atau bahan-bahan yang diperlukan dalam usaha produksi perikanan bagi masyarakat pesisir. meningkatkan usaha produktif masyarakat pesisir, dengan harapan peningkatan pendapatan dari peningkatan usaha produktif masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya berikut ini :

“Ya Pemerintah memberikan bantuan modal bisa dari bank bisa juga dari koperasi tujuannya ya supaya nelayan-nelayan ini punya modal usaha mengembangkan hasil produksi ikan yang ditangkapnya. Mudah kok modal yang dikasih bisa lewat koperasi atau bank kemudian modal itu cukup dicicil aja. Selain itu modalnya terkadang bukan hanya uang namun pemerintah kasih gratis sertifikasi tanah” (WWC/SHR/12/4/2017).

Kebijakan dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan salah satunya adalah dengan memfasilitasi dan membiayai nelayan dalam membuat sertifikat tanah. Progam ini didasarkan pada keputusan Direktur

Jendral Perikanan Tangkap No.22/KEP-DJPT/2015 tentang petunjuk teknis penyiapan calon peserta pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan melalui sertifikasi hak atas tanah tahun 2015.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif (*liquid capital*) menjadi modal aktif (*active capital*), yang dapat dipakai sebagai jaminan ketika akan mengajukan kredit ke lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank.

Jadi dengan program sertifikasi hak atas tanah nelayan, nelayan yang sebelumnya kesulitan untuk mengakses pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun non bank karena jaminan yang tidak memadai, bisa menggunakan sertifikat tanahnya sebagai jaminan untuk syarat pembiayaan dari bank maupun lembaga non bank.

Melalui upaya sertifikasi hak atas tanah diharapkan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dapat memperoleh modal usaha. Dengan adanya tambahan modal usaha dapat meningkatkan usaha nelayan dan melakukan pengembangan ekonomi produktif lainnya.

Langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini adalah strategi parsial dimana strategi ini berkaitan dengan alokasi dan distribusi anggaran pendapatan dan belanja menurut satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam kasus ini pemerintah mengalokasikan dananya

untuk mengadakan program memfasilitasi dan membiayai nelayan dalam membuat sertifikat tanah yang pada akhirnya akan mempermudah nelayan dalam mendapatkan modal dengan cara menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada lembaga keuangan.

Strategi kebijakan untuk memfasilitasi dan membiayai nelayan dalam membuat sertifikat tanah merupakan kebijakan publik yang tepat dan baik untuk dikeluarkan, karena kebijakan yang baik merupakan respons positif dan proaktif terhadap kepentingan publik. Kebijakan tersebut merupakan respons yang positif terhadap kondisi masyarakat nelayan yang kesulitan mengakses modal. Hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan ini adalah monitoring dan pengawasan yang tepat kepada masyarakat nelayan penerima sertifikat hak atas tanah. Karena sifat nelayan yang konsumtif pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa sertifikat tanah milik nelayan digunakan untuk memperoleh modal bukan untuk hal yang konsumtif.

Adanya program pemberian modal usaha berupa pembiayaan serta gratis sertifikasi tanah ini merupakan salah satu strategi yang menarik bagi pemberdayaan masyarakat. Melalui hal tersebut setidaknya masyarakat menjadi sumber daya manusia yang lebih berpotensi dan bermanfaat bagi orang lain terutama mengembangkan hasil produksi miliknya sehingga menjadikan kawasan Kabupaten Sumenep sebagai kawasan yang diberi program minopolitan. Dijelaskan lebih lanjut pada wawancara Staf Bidang Pengawasan bapak Supeno sebagai berikut:

“Modal yang diberikan melalui koperasi itu anggaran yang tersedia dari APBD memang tidak terlalu besar jumlahnya sehingga tidak semua masyarakat menikmati stimulant itu soalnya kan kebutuhan mereka beragam artinya dari spesifikasi alat dari daerah atau kecamatan kan ga sama jadi nggak masing-masing pelaku mendapatkan modal yang diinginkan” (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Gambar 4.7 Bantuan untuk kelompok usaha bersama



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Pada dasarnya program modal ini diberikan tak lain bertujuan untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat sendiri. Sehingga keberhasilan program kredit dalam hal ini tidak saja dicerminkan oleh peningkatan produksi, akan tetapi ditentukan pula oleh tingkat pendapatan nelayan itu sendiri, kelancaran pengembalian kredit atau kecilnya jumlah tunggakan nelayan. Keberhasilan program kredit dalam hal ini sangat ditentukan seberapa jauh nelayan merasakan manfaat kredit dan mengakumulasi modal yang diperoleh dari pemanfaatan kredit, sehingga mampu menginvestasikan kembali modal untuk memperluas usaha. Baik untuk jangka panjang sebagai saving/ investasi, maupun untuk kegiatan produksi dan konsumsi rumah tangga.

Bagi nelayan penerima kredit, umumnya tambahan pendapatan yang diterima tidak dapat dipisahkan dengan keperluan rumahtangga, cicilan kredit dan aktifitas produksi berikutnya, sehingga akan sangat mempengaruhi pendapatan bersih yang diterima. Namun, fenomena yang terjadi justru sebaliknya. Adanya pemberian modal usaha justru terkadang tidak dikelola sebaik mungkin sesuai kebutuhan yang seharusnya sehingga modal yang diberikan tidak dikembalikan sebagaimana kewajiban sang nelayan. Seperti uraian berikut wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya ini, yaitu:

“Seharusnya kalau minjem untuk modal usaha kan harusnya diperhitungkan mampu nggak dia bayar itu nah ini kejadiannya hasil kreditnya tidak untuk pengembangan usaha tapi untuk lainnya makanya lebih kepada mental mereka aja kan misal dia pinjem modal sebesar 10.000.000 harusnya dipertimbangkan dia bisa gak bayar tiap bulannya dengan usaha yang dimiliki itu” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Melihat adanya fenomena demikian maka dapat dijelaskan bahwa pemberian modal usaha sebagai stimulant pemerintah Sumenep bagi masyarakatnya tidak dilakukan secara optimal sehingga pendapatan perekonomian yang diharapkan belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dinas perikanan selaku penyedia dana yang disalurkan kepada lembaga koperasi menjelaskan dalam hasil wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati berikut ini, yaitu:

“Kalau dana kita dibantu sama dinas perikanan Sumenep sendiri jadi ya otomatis instansi terkait ya PEMDA dan Dinas Perikanan kalau masalah modal. Masalah modal ini sangat rumit mbak, di satu sisi masyarakat dikasih modal tapi malah nggak dikembalikan padahal tujuannya kan baik untuk perkembangan usaha mereka sedniri” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Pemberdayaan kelompok nelayan merupakan hal yang penting dalam mencapai ke arah tujuan pembangunan perikanan sebab kelompok nelayan merupakan kelembagaan terdepan di tingkat operasional dan berperan sebagai pelaku utama dalam pengembangan usaha perikanan. Pemberdayaan kelompok nelayan ini merupakan kondisi yang ditumbuhkan melalui penyuluhan perikanan dalam bentuk perubahan perilaku anggotanya. Untuk mampu melaksanakan usaha yang terus berkembang dimasa depan, tentunya diperlukan kualifikasi yang lebih baik bagi pelaku usaha, atau SDM perikanan (khususnya nelayan dan serentetan kelompok yang terkait erat dengannya).

Program minopolitan yang sedang dikembangkan Sumenep ini pada umumnya memberikan dukungan permodalan, pendekatan ini sangat membantu warga binaan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Bentuknya dukungan permodalan yang diberikan pada warga binaan dapat diklasifikasikan dalam bentuk bantuan cuma-cuma, bantuan bergulir/berputar bantuan subsidi, bantuan kredit komersial (dengan kemudahan khususnya).

Semua bentuk bantuan diatas bagi warga binaan sendiri merupakan dukungan dalam meningkatkan skala usahanya. Masalahnya adalah bentuk bantuan yang bagaimana yang dapat mendorong dan memotivasi warga binaan mencapai kemandirian. Di samping itu, program minopolitan yang sedang dikembangkan memiliki keterbatasan sumber daya baik tenaga, waktu dan dana terlebih lagi dalam situasi semakin langkanya sumber-

sumber permodalan warga binaan. Dalam hubungan ini, maka dimasa depan harus mulai diantisipasi bentuk dukungan modal/kredit yang berdimensi pendidikan, bukan bentuk dukungan “charitatif” atau belas kasihan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kredit yang berdimensi pendidikan adalah secara berkelompok maupun perorangan dapat akses kredit secara normal pada lembaga keuangan dalam hal ini di Bank. Untuk mencapai tahap itu, warga binaan harus mulai dikenalkan dengan *Financial Intermediary Institutions* (Lembaga Keuangan Perantara) di wilayahnya. Disamping akses pada permodalan, warga binaan (kelompok) perlu dibimbing untuk dapat akses warga binaan terhadap sumber data setempat (Sumber Daya Alam), hal ini disampaikan dalam hasil wawancara Staf Bidang Pengawasan bapak Supeno berikut ini:

“Lembaga perantara tersebut adalah koperasi nah melalui koperasi maka kelembagaan kelompok tersebut dapat difasilitasi berupa modal usaha dan kemudian jadi tugas mereka untuk mengembangkan serta mengembalikan sesuai perjanjian. Namun, kembali pada komitmen jika dalam pelaksanaannya justru banyak yang tidak konsekuen sama hutangnya” (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Strategi pemberian modal usaha dirasa menjadi strategi yang cukup baik namun dalam implementasinya justru tidak sesuai. Usaha yang diharapkan tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik justru stimulant yang diberikan sebagai uang modal tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dengan baik.

d. Pengembangan Kelembagaan

1) Membentuk Kelompok Nelayan

Dalam pengembangan kelembagaan masyarakat nelayan disekitar pesisir kabupaten Sumenep dilakukan dengan cara membentuk kelompok nelayan yang memiliki tujuan bersama sehingga membentuk sebuah organisasi yang terstruktur dengan dilengkapi dengan kepengurusan misalnya ketua bendahara dan anggota hal ini dilakukan agar dalam kelompok nelayan berjalan sistematis dan efisien. Adapun fungsi dalam membentuk kelompok nelayan hingga menjadi sebuah organisasi yang terstruktur adalah memudahkan untuk saling mengkoordinasikan dan mengatur sebuah permodalan atau mendistribusikan permodalan melalui ketua kelompok nelayan kepada seluruh anggotanya. Selain itu juga pembentukan kelembagaan melalui kelompok nelayan akan menjadi media atau wadah dalam menampung segala aspirasi masyarakat pesisir khususnya kelompok nelayan dalam daerah metropolitan dalam mengembangkan usaha dalam bidang komoditas perikanan dipesisir kabupaten Sumenep.

Pengembangan kelembagaan melalui membentuk kelompok nelayan juga telah dijelaskan oleh satu anggota kelompok nelayan di kabupaten Sumenep yang menyatakan bahwa:

“Pembentukan kelompok nelayan itu penting mba karena dapat menumbuhkan hasil dari komoditas perikanan laut disini selian itu juga kerjasama antar anggota akan mempermudah para nelayan dalam mencari penghasilan.kalau pas ada masala misalnya tentang peralatan, terus penjualan ikan dimana semua akan dibahas

bersama dan dicarikan solusi nah kalau sendiri bagaimana pasti kebingungan mba”

Wawancara di atas juga didukung oleh pernyataan dari ketua kelompok nelayan kabupaten sumenep bapak Sucipto yang mengatakan bahwa:

“Mengembangkan kelembagaan dimasyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan sangat penting mba, saya ini bukan ketua hanya dipercaya oleh beberapa orang yang kami bersepakat kerjasama dalam melakukan pengembangan usaha kami dalam hal perikanan menjadi penganggung jawab. Akan tetapi setelah adanya sebuah program kerja pemerintah terkait dengan pengembangan daerah pesisir menjadi minipolitan akhirnya kami dibantu dengan pemerintah kabupaten sumenep membentuk kelompok tani yang sistematis kayak organisai jadi ada ketua bendahara dan anggota ya tujuannya biar ada yang ngurus kelompok nelayan, kalau ada bantuan permodalan bias langsung didistribusikan, dan kalau ada masalah dapat diselesaikan bersama yang kemudian juga dijasikan sebagai tempat berkeluh kesah atau masukan sebagai wujud aspirasi masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kelembagaan masyarakat salah satunya melalui pembentukan kelompok nelayan telah dilakukan bahkan terbentuk menjadi sebuah organisai yang memiliki struktur yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat pesisir dikabupaten Sumenep.

2) Kerjasama kelembagaan antara kelompok nelayan dengan lembaga keuangan mikro baik bank maupun non bank

LKM yang didukung dengan kemudahan akses, prosedur, dan kedekatan terhadap masyarakat akan membantu keberdayaan kelompok miskin terutama untuk meningkatkan produktivitasnya melalui usaha kecil yang mereka jalankan agar tidak terus menerus bergantung pada kemampuan orang lain atau dirinya

sendiri yang amat terbatas serta dapat meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu kerjasama kelembagaan antar kelompok nelayan dengan lembaga keuangan mikro baik bank maupun non bank perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar usaha yang dibantu dengan permodalan yang cukup akan membantu menumbuhkan usaha para kelompok nelayan di kabupaten sumenep. Untuk itu beberapa kerjasama yang dilakukan antara lain yaitu 1) melakukan kerjasama dengan LKM formal bank diantaranya Badan Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BNI, mandiri unit mikro, Danamon Simpan Pinjam (DSP), dan BRI Unit, 2) melakukan kerja sama melalui LKM formal nonbank mencakup Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), koperasi (Koperasi Simpan Pinjam/KSP dan Koperasi Unit Desa/KUD), dan pegadaian, 3) LKM informal terdiri dari berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) serta berbagai bentuk kelompok lainnya. Beberapa kerjasama dengan ketiga LKM tersebut digunakan sebagai mempermudah pengembangan usaha yang dijalankan oleh kelompok nelayan kabupaten sumenep. Kerjasama itupun didukung oleh pemerintah setempat yang memiliki program minapolitan sehingga masyarakat pesisir yang terbentuk dalam kelompok nelayan di kabupaten Sumenep memiliki akses yang mudal dalam hal permodalan.

Selain itu juga berdasarkan informasi yang beredar bahwa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga meminta agar bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP), tidak diserahkan langsung kepada pribadi atau pun kelompok-kelompok nelayan tertentu. Kementerian Koperasi dan UKM sendiri telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan KKP terkait pembentukan koperasi-koperasi nelayan. Hal ini dilakukan agar mendorong kelompok nelayan membentuk koperasi sehingga bantuan permodalan baik berupa uang atau barang dapat disalurkan dengan baik. Saat ini KKP sendiri tengah membangun sebanyak 3.540 unit kapal penangkap ikan yang akan dibagikan kepada nelayan-nelayan sebagai bantuan. Kapal-kapal tersebut terdiri dari, kapal penangkap kurang dari 5 GT (gross tonage) sebanyak 1.000 unit, 5 GT sebanyak 1.000 unit, ukuran 10 GT 1.000 unit, ukuran 20 GT 500 unit, ukuran 40 GT 40 unit. Lalu kapal angkut ada tujuh unit dan alat tangkap sebanyak 23.700 unit. Bantuan permodalan tersebut yang bersal dari pemerintah hanya dapat diberikan kepada kelompok nelayan berbadan hukum yang telah membentuk koperasi. Dengan demikian saat ini kelompok nelayan di kabupaten khususnya pada daerah minapolitan terus berupayan melakukan pengembangan kelembagaan dengan berbagai macam cara misalnya dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan penguatan kelembagaan atau organisasi yang selanjutnya siap untuk membentuk sebuah koperasi yang dapat membantu kelompok-kelompok nelayan di kabupaten Sumenep.

Berdasarkan keterangan di atas juga dijelaskan oleh bapak Sutrisno sebagai ketua kelompok nelayan kabupaten Sumenep sebagai berikut :

“Dalam mengembangkan kelembagaan masyarakat dan usaha yang dilakukan oleh kelompok nelayan melakukan beberapa langkah kerjasama yang dilakukan dengan LKM baik bank maupun non bank untuk mendukung permodalan. Selain itu juga kami ingin bekerja sama dengan

para kelompok nelayan yang lain dalam membangun koperasi bersama sehingga mempermudah usaha yang dijalankan. selain itu kalau sudah punya koperasi yang bagus kuat lembaganya dan didukung kelompok tani yang bagus juga maka permodalan yang didapatkan akan memiliki akses yang lebih mudah bahkan pemerinatah pun tidak akan sungka memberikan bantuan karena kita terpercaya melalui kelembagan masyarakat yang kita bangun melalui koperasi bersama “

Hal ini juga didukung oleh ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya

Yang menyatakan sebagai berikut:

“y mba kami juga sudah menghimbau kepada seluruh kelompok tani yang bagus untuk melakuakn kerjasama dengan kelompok nelayan yang lainnya di pesisir kabupaten Sumenep ini untuk membentuk koperasi yang akan dibantu oleh pemerinatah untuk dilegalitaskan sehingga saat ada bantuan permodalan baii berupa uang atau barang peralatan masyarakat pesisir kabupaten Sumenep bisa mendapatkannya. ya berdasarkan dengan berita juga kalaunsudah ada MOU Antara koperasi, KPP, dan UKM dalam dukungannya terhadap pembentukan koperasi yang dilalakukan oleh kelompok nelyan.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kelembagaan dengan melakukan kerjasama dengan LKM baik Bank maupun Non bank telah diakukan dan saat ini para kelompok nelayan telah melakukan kerjasama untuk membentuk sebuah koperasi. Hal ini dilakukan agar memberikan akses yang mudah dalam mendapatkan permodalan usaha

3) Pengembangan Sarana dan Prasarana

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nelayan, menumbuhkembangkan kewirausahaan nelayan adalah melalui penyediaan paket bantuan yang dikelola oleh kelompok nelayan melalui Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam progam Pengembangan Usaha Mina Mandiri (PUMM).

Dengan adanya pemberian bantuan langsung yang berupa sarana penangkapan ikan dan sarana pendukung lainnya pendapatan nelayan akan bertambah, karena pada dasarnya sumber daya di lautan adalah sumber daya bersama (*common resources*). Pada sumber daya bersama mereka yang memiliki kemampuan yang lebih dari segi manusia maupun dari segi alat yang bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan dari Menteri Kelautan, Dinas Kelautan Sumenep bekerja sama dengan toko maupun perusahaan penyedia peralatan tangkap yang ada di Sumenep agar nelayan bisa memilih penyedia barang yang cocok untuk mereka. Kemudian setelah memenuhi prosedur yang ditetapkan nelayan barang tidak dikirimkan kepada nelayan melainkan bisa mengambil peralatan tersebut ditoko yang sudah bekerjasama dengan dinas. Hal tersebut dilakukan agar terjadi bantuan lebih cepat sampai kepada nelayan. Dijelaskan dalam hasil wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati berikut ini:

“Pasca pemberian bantuan dinas juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok nelayan yang diberi bantuan. Dinas perikanan membina nelayan mulai dari administrasi, manajemen dan dari segi keuangan. Pembinaan yang dilakukan Dinas Kelautan Sumenep bertujuan agar nelayan bisa lebih memaksimalkan pendapatan yang dia miliki” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Strategi kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan diterapkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Minapolitan Kabupaten Sumenep merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Dengan pemberian sarana dan prasana untuk melaut akan meningkatkan kemampuan nelayan untuk mendapatkan hasil.

Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Sejalan dengan itu, Dinas Perhubungan juga sedang mempersiapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021. Baik RPJMD maupun Renstra disusun di tengah-tengah pertumbuhan perekonomian yang sangat dinamis bukan saja oleh karena kondisi perekonomian global yang fluktuatif akibat berbagai krisis, akan tetapi juga karena perekonomian nasional yang relatif stabil namun tetap masih rentan terhadap pengaruh global. Hal ini dijelaskan narasumber ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya sebagai berikut:

“Renstra adalah dokumen strategis SKPD untuk menjalankan program-program RPJMD di sektornya masing-masing. Tujuannya kan untuk mewujudkan Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional, tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Kabupaten Sumenep”. (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan. Era pemerintahan 2016-2021 dipandang sangat strategis sekaligus sangat kritis. Strategis dalam pengertian inilah era dimana infrastruktur, transportasi, dan sistem pelayanan publik yang profesional harus dibangun untuk menutup defisit dan kesenjangan yang sudah terakumulasi bertahun-tahun.

Fokus Kabupaten Sumenep dalam membangun infrastruktur transportasi akan membawa dampak yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian, daya saing, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas menjalankan rencana strategis berupa pengembangan sarana pra sarana seperti yang diuraikan dalam hasil wawancara Staf Bidang Pengawasan bapak Supeno berikut ini :

“Dari sisi infrastruktur, prasyarat yang sudah dimiliki Kabupaten Sumenep untuk pengembangan rumput laut sudah cukup baik yang meliputi: ketersediaan listrik, ketersediaan air PDAM, akses jalan yang baik dan ketersediaan pelabuhan” (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Banyaknya potensi unggulan yang ada di Kabupaten Sumenep sendiri membuat Pemerintah Daerah Sumenep memiliki strategi aktif untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekitar. Hal ini dijelaskan melalui wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati sebagai berikut:

“Kita ada bantuan berupa stimulant atau sokongan infrastruktur ya kayak saluran untuk produksi cuma ya ndak terlalu banyak jadi ya cuma terbatas akhirnya kan tidak semua modal bisa disalurkan untuk kelompok dan dialokasikan ke infrastruktur yang belum memadai. Anggarannya ada dari APBD sendiri tapi ya itu harus dibagi-bagi supaya tepat sasaran” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan pemberdayaan

masyarakat di Kabupaten Sumenep sendiri dalam pembangunan sebagai suatu pendekatan pembangunan alternatif, fokusnya tidak hanya pada keterlibatan pihak penerima dalam proses pembangunan tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasinya guna melindungi kehidupan mereka. Demikian pula dengan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam kegiatan program Minapolitan di Kabupaten Sumenep sendiri.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Minapolitan di Kabupaten Sumenep sendiri adalah berupa kegiatan sosial dan pembangunan sarana prasarana. Diantara sarana prasarana yang telah dibangun adalah jenis prasarana dasar lingkungan berupa prasarana jalan guna meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat, Dijelaskan dalam hasil wawancara Staf Bidang Pengawasan bapak Supeno berikut ini :

“Kita bangun dengan bantuan pembangunan prasarana saluran untuk mencegah banjir dan kenyamanan lingkungan pemukiman; jenis prasarana yang menunjang perekonomian seperti saluran untuk produksi pembudidayaan ikan dan jenis sarana yang mendukung aktivitas social”. (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Penyediaan sarana prasarana melalui program Minapolitan tersebut menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan program Minapolitan dinilai cukup tinggi dan output sarana prasarana program Minapolitan yang telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati berikut ini :

“Manfaatnya ya saya rasa cukup baik soalnya masyarakat bisa mandiri dalam melakukan aktivitas sosialnya dengan baik lalu bisa memiliki sarana prasarana yang memadai dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan otomatis akan meningkatkan ekonomi sekitar. Namun harapan kemandirian masyarakat dalam mengelola pembangunan belum terwujud, masyarakat masih sangat berharap pada bantuan dari berbagai pihak untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Ya makanya diberi stimulant berupa bantuan” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Dari Infrastruktur yang dikembangkan itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan listrik yang sudah ada listrik dengan kapasitas daya mencapai 53.099.102 VA. Dari jumlah kapasitas tersebut, hanya sekitar 7.408.773 VA yang saat ini terpakai. Kapasitas daya listrik ini cukup memadai mengingat kebutuhan listrik khusus untuk industri ATC hanya sebesar 33.000 VA.
- 2) Ketersediaan air PDAM dengan potensi produksi sebesar 6.868.864 m³, sementara tingkat konsumsi hanya mencapai 2.771.633 m³. Jumlah potensi air ini semakin bertambah jika diperhitungkan dengan potensi air tanah yang dapat digunakan untuk proses produksi ATC, Akses jalan cukup baik. Dari sekitar 1.629.900 km panjang jalan di Kabupaten Sumenep, sekitar 84,81% dalam kondisi baik. Panjang jalan yang diaspal mencapai 92,79%. Kondisi jalan yang cukup baik

ini akan memudahkan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan transportasi dan distribusi barang.

3) Ketersediaan pelabuhan.

Selain transportasi darat, keberadaan transportasi laut sangat diperlukan mengingat wilayah Kabupaten Sumenep adalah kepulauan. Pelabuhan yang berada di Kecamatan Kalianget melayani rute Kalianget-Kangean dan Kalianget-Jangkar. Wilayah ini juga berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Perak yang berada di Kota Surabaya.

Langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini adalah strategi parsial dimana strategi ini berkaitan dengan alokasi dan distribusi anggaran pendapatan dan belanja menurut satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam kasus ini pemerintah mengalokasikan dananya untuk satu kelompok usaha bersama nelayan untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan pendapatan nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha kecil.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam karakteristiknya termasuk kebijakan yang memiliki visi ke depan dan mempunyai dimensi yang luas karena tidak didedikasikan hanya untuk kepentingan sesaat. Dengan memberikan nelayan bantuan berupa alat yang dapat membantu nelayan menangkap ikan bukan hanya membantu mereka pada saat sementara saja tetapi kedepannya akan *mengupgrade* kemampuan mereka

dalam menangkap ikan yang hasilnya adalah peningkatan pendapatan mereka.

4) Penyedia Informasi Tepat Guna

Salah satu elemen yang menjadikan kekuatan pada strategi pemberdayaan masyarakat adalah informasi. Ketersediaan informasi merupakan ketersediaan kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, tingkat kepedulian, pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individu dan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif dan berguna, tidak sekedar volume dan besaran.

Dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi, manusia dituntut untuk selalu berpikir bagaimana cara yang cepat dan tepat dalam menciptakan suatu sarana yang nantinya akan membantu proses kerja manusia. Salah satu di antaranya adalah teknologi komputer yang sampai sekarang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Untuk itu, manusia dituntut untuk selalu mengetahui tentang teknologi di dunia global yang maju saat ini.

Penggunaan teknologi sederhana/bersifat tradisional dalam proses penangkapan ikan serta pekerjaan yang tidak tetap, yang tergantung musim mengakibatkan tingkat pendapatan nelayan sangat rendah, sehingga nelayan di daerah ini memiliki kesejahteraan yang minim. Dalam kehidupan sehari-hari nelayan umumnya mengikutsertakan anggota rumahtangga lain seperti istri untuk bekerja, dan pada musim paceklik nelayan akan mencari

tambahan pendapatan di luar sektor perikanan. Dijelaskan dalam hasil wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya sebagai berikut :

“Kondisi ini mengakibatkan nelayan sulit untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga dan tergolong miskin. Indikasinya, pendapatan nelayan sekitar Rp 300 000 - Rp 400 000 per bulan, tingkat pendidikan rata-rata sekolah dasar, pemukiman yang kumuh, dengan kepemilikan perahu jukung dan peralatan tangkap yang sederhana atau hanya memiliki modal kerja. Makanya untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan ekstensifikasi usaha yang membutuhkan modal yang cukup besar, yaitu pengadaan perahu/kapal, mesin dan alat penangkapan ikan. Disinilah pemerintah Kabupaten sendiri kerjasama dengan Dinas koperasi, dinas perdagangan serta dinas industri” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Mengingat adanya keterbatasan dana serta kondisi yang tidak menentu maka nelayan juga memerlukan sebuah penyesuaian atas ketersediaan informasi tepat guna. Maka dengan keterbatasan itulah kadang menyebabkan bahwa target sasaran terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dijelaskan dalam hasil wawancara Staf Bidang Pengawasan bapak Supeno berikut ini :

“Ya namanya informasi kan kadang ada yang tidak tepat. Dinas beri modal pada nelayan tujuannya untuk usaha nah ini kadang kita kasihnya juga gak tepat kadang lupa dengan data yang lain akhirnya kan tidak sesuai dengan target makanya modalnya ada yang gak dikembalikan itu karena analisisnya salah tidak disesuaikan dengan kemampuan” (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Mengingat betapa pentingnya sebuah ketersediaan informasi yang tepat guna maka Pemerintah Kabupaten Sumenep berupaya dengan maksimal mengembangkan sebuah informasi supaya tingkat produktivitas masyarakat semakin tinggi dan dapat dikelola dengan lebih baik lagi di

sector ketepatan informasi. Sehingga sebuah kawasan minapolitan di Kabupaten Sumenep menjadi kawasan dengan program yang penuh rencana strategis.

3. Faktor yang berpengaruh terhadap Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Program Minapolitan

Perikanan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Perikanan tidak saja mengubah pola peradaban tetapi, juga telah mengubah pola pemanfaatan sumber daya ikan dari sekedar kebutuhan pangan menjadi cara hidup (*way of life*) dan juga kebutuhan ekonomi.

Sektor perikanan mempunyai peran dalam perekonomian yang bisa dilihat berdasarkan kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan. Perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung memainkan peranan penting bagi jutaan orang yang bergantung hidupnya pada sektor perikanan. Dalam rilis Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2013 jumlah total tenaga kerja yang terlibat dalam sektor perikanan (tangkap dan budi daya) mencapai 2.216.119 orang. Di Indonesia sendiri sebagian besar masyarakat di daerah pesisir sangat bergantung hidupnya dari sektor perikanan sehingga tidaklah mengherankan jika sektor perikanan sering disebut sebagai "*employment of the last resort*" di mana tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor lain akan mudah diserap oleh sektor perikanan.

Salah satu kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumber daya perikanan adalah masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan merupakan

kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan mendapat penghasilan bersumber dari kegiatan menangkap ikan. Semakin banyak maka semakin besar pula pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan konsumsi keluarga. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya. Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada kenyataannya masih banyak nelayan belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat. Oleh sebab itulah dilakukan sebuah rencana strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi mata pencaharian nelayan.

Usaha pembangunan sektor perikanan memerlukan strategi kebijakan yang inovatif. Adapun strategi yang dilakukan pemerintah meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan koperasi melalui pemberian modal bagi kelompok nelayan untuk mengembangkan sebuah budidaya dari hasil produksi ikan yang ditangkap. Selain itu pengembangan yang dilakukan dalam strategi pemberian sarana dan prasarana serta ketersediaan informasi tepat guna. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Sumenep sendiri tentu setiap strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan di program Minapolitan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

1. Faktor Pendukung

1) Adanya anggaran melalui APBN yang disediakan oleh pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Sumenep sendiri memiliki anggaran yang cukup memadai mengenai APBN yang disediakan oleh pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentu dipengaruhi oleh instansi atau lembaga perbankan dan lembaga finansial terkait yang ikut membantu membiayai nelayan dalam pemberian stimulant berupa modal. Dijelaskan dalam hasil wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya sebagai berikut ini :

“Adanya modal yang akan diberikan kepada para nelayan ini berasal dari APBD sebenarnya dan kerjasama dengan lembaga perbankan dan lembaga organisasi semacam koperasi. Itu jadi pendukungnya mbak kalau penghambatnya kan tidak semua nelayan bisa nah tinggal bagaimana distribusi modal tersebut” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Peran yang lebih besar lagi dari pelaksanaan anggaran dapat diperoleh melalui alokasi pada beberapa komponen pengeluaran pembiayaan, yang antara lain mencakup kredit usaha rakyat, dana bergulir, kewajiban penjaminan dan penerusan pinjaman, serta dukungan untuk membantu pengadaan tanah yang sering menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Dijelaskan dalam hasil wawancara Staf Bidang Pengawasan bapak Supeno berikut ini, yaitu:

“Dananya banyak manfaatnya pasti ya untuk pengembangan usaha sendiri lalu bisa juga untuk mbantu pengadaan setifikat semua tergantung kebijakan pembagiannya kalau itu yang penting APBN dan APBD itu selalu ada untuk pemberdayaan” (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan belanja Pemerintah Daerah sendiri maka fungsi alokasi dilakukan antara lain melalui pendanaan pada berbagai program dan investasi produktif, seperti pendanaan pembangunan infrastruktur atau belanja barang dan jasa melalui program Minapolitan.

- 2) Adanya komitmen dari Dinas dan instansi terkait untuk mensukseskan program pemberdayaan masyarakat Serta Keterlibatan dengan pihak lain. Administrasi publik mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup dari peradapan manusia, karena administrasi publik mempunyai fungsi kemampuan untuk mengkoordinasikan berbagai macam energi sosial yang sering kali bertentangan satu sama lain dalam suatu organisme yang bulat padu, sehingga energi-energi tersebut dapat bergerak sebagai kemampuan dari satu kesatuan. Hal inilah yang terjadi dalam pemerintah Kabupaten Sumenep yang ikut menyukseskan pemberdayaan masyarakat dalam usaha budidaya ikan. Berikut uraian wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati:

“Ya jelas sangat mendukung kalau masalah instansi terkait itu saling support karena kan tujuannya untuk kemajuan daerah Sumenep sendiri mbak. Jadi ada sendiri-sendiri intansinya ada dinas perikanan, dinas koperasi, dinas kelautan dan dinas perdagangan” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Administrasi publik berkaitan erat dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sasaran kebijakan administrasi publik juga

meliputi semua bidang dan semua aktivitas yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan-kebijakan sektor publik seperti salah satunya usaha kecil. Dalam konteks ini salah satu usaha tersebut adalah usaha budidaya ikan hasil nelayan yang ada di Kabupaten Sumenep Jawa Timur sendiri. Hal ini yang dijelaskan dalam hasil wawancara Staf Bidang Pengawasan bapak Supeno berikut ini :

“Kekuatan kita ada dari dukungan berbagai dinas yang meliputi dinas perikanan, dinas kelautan, dinas perindustrian dan dinas koperasi jadi semua ikut mendukung apalagi sudah ada kerjasama dengan lembaga perbankan terkait” (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Kebijakan desentralisasi sebagaimana dituangkan dalam UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2000, diharapkan akan lebih memberikan peluang pada perubahan kehidupan pemerintahan daerah yang demokratis untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Hakekat demokratis adalah keterlibatan rakyat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Disamping itu juga memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan mengelola segenap potensi daerah untuk kemajuan pembangunan bagi daerahnya dengan memberikan tekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Dijelaskan dalam hasil wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati berikut ini :

“Namanya aja pemberdayaan bagi masyarakat, artinya semua kegiatan dan aktivitas melibatkan masyarakat sendiri dan tujuannya kan tingkat perekonomiannya bisa meningkat jadi sangat terdukung sekali dengan antusiasme masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sehingga expose tempat tinggal di Kabupaten Sumenep bisa dikembangkan terutama di sector budidaya ikan” (WWC/ERN/12/4/2017).

Dengan otonomi daerah tersebut memungkinkan daerah dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategi yang lebih tepat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi di daerah. Keterkaitan antar instansi yang mendukung tersebut secara bertahap menunjukkan upaya maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri. Berikut uraian narasumber ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya, yaitu:

“Sebetulnya mulai perencanaan dan verifikasi sudah ada ya tinggal kelompok itu bisa nerima nggak atas apa yang sudah direncanakan pada nelayan sendiri. Jadi ini membuktikan bahwa instansi sangat mendukung sekali adanya strategi pemberdayaan masyarakat di kawasan sumenep sendiri” (WWC/SHR/12/4/2017).

Melihat adanya potensi daerah yang cukup baik di Kabupaten Sumenep sendiri menjadikan Dinas dan instansi terkait lainnya bisa memberikan dukungan nyata berupa modal usaha untuk nelayan dalam budidaya usaha ikan hasil tangkapannya.

2. Faktor Penghambat

1) Lemahnya koordinasi kerja dan komitmen dengan nelayan

Sebenarnya instansi pemerintah yang terkait dengan kegiatan program pemberdayaan masyarakat cukup komprehensif, namun pola

pelaksanaan tugasnya dan wewenang antar instansi belum terpadu. Selain itu untuk lingkup penyelenggaraan program ini koordinasinya belum berjalan dengan baik. Masing-masing fasilitator bekerja apa adanya tanpa ada komunikasi yang rutin dan berkelanjutan, sehingga permasalahan tertentu tidak ada kesamaan pandangan atas kegiatan ini.

Selain lemahnya kondisi kerja, adanya kondisi cuaca yang tidak menentu mengakibatkan pendapatan dari hasil produksi nelayan juga semakin rendah. Hal ini dikarenakan cuaca yang tidak menentu menjadi penghambat nelayan dalam bekerja setiap hari. Padahal hakikatnya semakin banyak ikan yang ditangkap maka semakin banyak pula tingkat pendapatan yang akan dimiliki. Namun, dengan kondisi cuaca yang tak menentu maka menjadi hambatan selain itu mental yang dimiliki nelayan juga menjadi kurang maksimal. Seperti uraian wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati berikut ini :

“Selama ini kita terus terang belum maksimal mendata karena memang kadang-ladang tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya masalah uangnya jadi alasannya adalah jumlahnya terlalu sedikit dan alatnya tidak cocok atau juga faktor alam setelah menerima itu kalau penangkapannya ada musimnya ada cuacanya tergantung orangnya sih nggak selalu merugi juga” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Cuaca dan kondisi yang tidak menentu bagi para nelayan dalam melakukan aktivitas menangkap ikan menjadikan salah satu hambatan dalam pengembangan budidaya. Apabila kondisi sedang mendukung tentunya hasil produksi ikan juga akan banyak dan budidaya juga semakin baik. Namun, sebaliknya apabila cuaca sedang tidak mendukung

maka dapat mempengaruhi hasil ikan yang ditangkap serta tingkat pendapatan nelayan otomatis akan menurun.

- 2) Kurang optimalnya sosialisasi sehingga sulitnya membedakan antara pembudidaya dan penangkapan. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk tahapan sosialisasi belum berjalan secara efektif, karena sosialisasi dilaksanakan melalui media musyawarah. Hal ini berdampak pada kurangnya pengetahuan pada masyarakat sekitar dan yang awam sekalipun karena belum bisa membedakan antara pengelolaan budidaya yang dikembangkan di kawasan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu program Minapolitan. Berikut uraian wawancara Staf Bidang Pengawasan bapak Supeno terkait hal tersebut:

“Kalau bicara komoditi ya komoditi hampir semua jenis usaha perikanan itu ada apalagi di laut kan banyak penangkapan jadi nanti akhirnya kan nilai ekonominya tinggi nah kalau budidaya di air payaunya agak sulit kalau di pesisir dan lain-lainnya ya bandeng tapi sumenep masih kalah disbanding gresik dan sidoarjo. Disini kan dominannya lele, bandeng dan faname. Adalagi garam di rumput laut juga banyak karang. Nah itu semua kalau masuk ukuran pasar ya dijual kalau enggak ya dibudidayakan lalu dipasarkan sendiri ke pengepul yang butuh kan lebih untung” (WWC/SPN/12/4/ 2017).

Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan pihak PEMDA Kabupaten Sumenep sendiri mengakibatkan nelayan menjadi kurang memahami perbedaan antara penangkapan dan pembudidayaan. Bagi nelayan yang awam cukup dengan menangkap saja kemudian dijual ke pasar itu sudah cukup namun jika mereka mampu mengetahui cara berbudidaya sehingga nelayan memiliki usaha lain selain hanya menangkap ikan di laut saja. Apabila sosialisasi serta pemberian bantuan

dari pemerintah dapat maksimal maka nelayan akan selalu memiliki ide kreatif serta inovatif untuk selalu bisa menangkap ikan dan membudidayakannya sendiri tanpa harus dijual ke pasar.

Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengembangan rumput laut memang diperlukan. Dimana peran masyarakat dan pemerintah dalam hal ini sangat penting dimana pemerintah yang menjadi kunci penting dalam pengembangan rumput laut di Pulau Poteran, selain itu kerjasama dengan swasta juga sangat diperlukan karena pemerintah tidak bisa menyediakan semua keperluan masyarakat pembudidaya rumput laut, misalnya dalam penyediaan modal pemerintah memiliki kekurangan, sehingga dalam hal ini swasta bisa berperan dalam membantu menyediakan modal.

3) Berubahnya Kebijakan/Kewenangan

Kebijakan atau kewenangan merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk sebuah program yang dilaksanakan di sebuah Kabupaten. Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan rumput laut di Kabupaten Sumenep, dalam hal ini kebijakan yang diperlukan merupakan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep. beberapa kebijakan terkait rumput laut berada pada beberapa bentuk rencana. Rencana tersebut antara lain Rencana Tata Ruang Kabupaten Sumenep tahun 2011-2031, serta Masterplan Kawasan Minapolitan Rumput laut Kabupaten Sumenep Tahun 2010.

Program Minapolitan merupakan salah satu program yang dimiliki Kabupaten Sumenep sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Seiring berjalannya waktu, kebijakan otonomi daerah yang dimiliki Kabupaten Sumenep seolah-olah menjadi kebijakan yang diambil alih provinsi karena dikeuarkannya Undang-Undang baru mengenai perikanan dan kelautan. Dijelaskan dalam hasil wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati berikut ini:

“Kami yang sebenarnya dalam hal pembudidayaan itu secara penuh ada di komoditas rumput laut seolah-olah semakin berkurang karena setelah kewenangannya berubah karena adanya Undang-Undang provinsi jadinya kewenangan minapolitan di payau jaraknya itu hanya 1-12 mil saja padahal sebelumnya bisa mencapai 24 mil. Hal ini tentu menjadi kekecewaan bagi kami” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya peraturan atau kewenangan yang baru justru menyulitkan pengembangan budidaya sendiri karena seharusnya pemberdayaan ini fokusnya ke masyarakat sendiri namun jika diubah kewenangannya akhirnya pemberdayaan masyarakat justru dianggap menyulitkan kabupaten Sumenep sendiri. Dijelaskan dalam hasil wawancara kepada Staf Bidang Perikanan Tangkap Bu Ernawati sebagai berikut:

“Pemberdayaan akhirnya berpengaruh pada tingkat ekonomi masyarakat sendiri nak apabila ditinjau dari minapolitan sendiri kan takutnya tumpang tindih padahal seharusnya kan lebih konsentrasi ke kabupatennya sendiri bukan ke wilayah yang menyeluruh. Hal itu yang jadi kendala menurut saya” (WWC/ERN/12/4/ 2017).

Peraturan dan kewenangan yang seharusnya adalah diokuskan pada pemberdayaan masyarakat daerah sekitar Kabupaten Sumenep saja

sehingga secara langsung tingkat perekonomian masyarakatnya juga ikut meningkat.

4. Hasil yang di capai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program minapolitan

Pertumbuhan Ekonomi di setiap negara berbeda-beda tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu negara tersebut dan tergantung dari berapa besar pendapatan / penghasilan dari penduduknya. Jika pendapatan Negara itu tinggi maka pertumbuhan ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan suatu negara itu di bawah rata-rata maka pertumbuhan ekonominya juga rendah.

Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara. Semuanya ini berpengaruh pada kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu pemerintah harus memperbaiki beberapa sektor yang sekiranya mampu memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat sekitar, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sumenep melalui Program Minapolitan. Dalam pemberdayaan ini, pembudidayaan justru difokuskan dengan adanya rumput laut sebagai komoditi unggulan. Dijelaskan oleh narasumber ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya sebagai berikut :

“Minapolitan disini untuk mengatur hulu ke hilir dari produksi masih tertatih untuk pengolahan rumput laut kemudian bisa terlaksana secara ideal karena dititik beratkan pada rumput laut” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Dalam sebuah upaya tentu tidak akan terlepas dari segala strategi supaya apa yang diinginkan dalam suatu daerah dapat tercapai maka tentunya harus dicapai dengan maksimal. Hal seperti inilah yang juga terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep bahwa dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya diperlukan sebuah strategi pemberdayaan yang juga disatupadukan dalam program Minapolitan.

Kabupaten Sumenep memiliki potensi berbagai jenis hasil perikanan baik perairan laut beserta hasil olahannya maupun hasil dari pertambakan. Salah satunya adalah rumput laut yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Sumenep Jawa Timur ini.

Dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat dan seiring bergulirnya otonomi daerah yang menyebabkan ketidakseimbangan pertumbuhan dan perkembangan produk-produk unggulan pada suatu wilayah, akan mengakibatkan kesenjangan pembangunan pada tiap wilayah di Kabupaten Sumenep. Sehingga perlu adanya peningkatan nilai tambah sektor perikanan melalui pengembangan industri berbasis perikanan. Sedangkan untuk pengembangan industri pengolahan perikanan yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan dimana wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai industri pengolahan perikanan seperti di Kabupaten Sumenep sendiri.

Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik dan

kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. Pengembangan wilayah harus menjadi suatu upaya untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dan lokal, sehingga wilayah dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Strategi pengembangan wilayah yang bertumpu pada sumberdaya lokal ini dikenal sebagai konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (*local economic development*). Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah. Dalam konteks inilah SDM nelayan akan dikembangkan melalui program Minopolitan yang tentunya diharapkan supaya tercipta suatu pemikiran baru bahwa mata pencaharian sebagai nelayan bisa dikembangkan dalam ketrampilan lain, sehingga tingkat pendapatan juga semakin meningkat. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara ibu Sri Harjani selaku Kabid Perikanan Budidaya berikut ini, yaitu:

“Memang Stimulant yang diberikan pada para nelayan itu tidak banyak bahkan tidak maksimal karena kan jumlahnya juga Cuma sedikit tapi setidaknya ya harus digunakan sebaik-baiknya. Setidaknya pemberian stimulant ini harus mengubah Mindset Masyarakat karena Bantuan hanya stimulant supaya mereka memahami saja nah sekarang kan lebih ketat lagi kalau mau kasih bantuan itu ya harus dipertimbangkan dulu supaya akhirnya masyarakat nggak njagani. Soalnya kalau nggak dapat yang rugi juga masyarakatnya sendiri” (WWC/SHR/12/4/ 2017).

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa modal yang diberikan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pemahaman sederhana bagi para nelayan dalam mengembangkan usaha perikananannya. Hal inilah yang

digunakan pemerintah sebagai strategi nyata untuk memberikan pelatihan akan pembudidayaan potensi yang ada di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.

Jadi pada prinsipnya untuk memajukan masyarakat di Kabupaten Sumenep ditengah krisis keuangan global yang berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, perlu ada langkah strategis dalam mengurai pesan dan tantangan ekonomi salah satunya dengan pengembangan sektor budidaya ikan ditengah potensi dan kekayaan alam yang melimpah melalui Program Minapolitan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Strategi Pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Program Minapolitan

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah suatu benda ekonomi yang langka dan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Berbeda dengan benda ekonomi lainnya, sumber daya manusia tidak memiliki wujud fisik sehingga dikategorikan sebagai benda ekonomi yang berbentuk jasa. Pembahasan ini difokuskan pada aksi pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Program Minapolitannya.

Eko (2004) menjelaskan bahwa cara pandang pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang

tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah. Dalam hal inilah Pemerintah memberikan cukup fasilitas dalam pengembangan wilayahnya. Sehingga hal ini sangat berhubungan dengan sumber daya manusia yang harus dikembangkan untuk mempertahankan program Minapolitan.

Aksi nyata pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri adalah dengan meningkatkan sumber daya kelautan serta mengoptimalkan aktivitas kelembagaan kelompok nelayan. Selain pemberian fasilitas pada hasil produksi perikanan, Pemerintah Kabupaten SUMenep juga mendirikan koperasi yang nantinya akan dikelola sendiri oleh masyarakat untuk memfasilitasi nelayan dan petambak. Kemudian Pemerintah Kabupaten Sumenep juga memberikan pengetahuan baru bagi nelayan melalui pelatihan tentang produksi dan budidaya.

Dalam konteks penelitian ini pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan ketrampilan lebih di luar penangkapan ikan di musimnya saja. Selain itu juga dilakukan pelatihan untuk pembibitan, pembenihan, pengolahan dan pembudidaya. Hal ini tentu akan menjadi modal bagi sang nelayan dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Tujuan dasar dari adanya pengembangan sumber daya manusia ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Sumenep yang bukan hanya sebagai kawasan minapolitan di sektor perikanan bisa pula dikembangkan dalam usaha budidaya. Hal

ini tentu juga akan berdampak pada sistem kelembagaan kelompok serta koperasi hasil produksi para nelayan.

Hal ini senada dengan ungkapan yang dikemukakan Pranarka dan Vidhyandika (1996:45) bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Oleh sebab itulah pengembangan sumber daya manusia dilakukan supra nelayan dan petambak memiliki keahlian khusus selain menjaring ikan di musim tertentu saja.

Dalam kaitannya dengan peningkatan sumber tenaga yang produktif, maka pembinaan yang dilakukan bukan hanya untuk peningkatan keterampilan dan keahlian, kemitraan, peningkatan mutu tetapi juga diarahkan pada peningkatan efisiensi. Sehingga hal ini secara tidak langsung memaksa nelayan atau petambak untuk memiliki pengetahuan serta ketrampilan mandiri sehingga tindakan yang berupaya diwujudkan pemerintah ini bisa dilakukan sesuai keinginan dalam diri akan mengembangkan usahanya seperti apa. Model strategi action dalam AIDA ini sangat cocok untuk proses pengembangan sumber daya manusia.

b. Pemberian Modal Usaha

Hutama (2000:1-2) menjelaskan bahwa *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin

adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta. Antara tiga aktor tersebut maka kondisi ini menengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus saling seimbang karena Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Ada beberapa upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha melalui Permodalan. Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

Aktivitas nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah memberikan modal usaha pada nelayan melalui koperasi simpan pinjam. Kemudahan yang diberikan pemerintah adalah nelayan berkewajiban mengembalikan dengan mencicil pinjaman. Sehingga modal usaha bukan hanya di awal tapi sebagai pengembangan. Hal ini sesuai dengan kajian teori sebelumnya bahwa Penambahan modal dari

lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan.

Dalam pemberian modal usaha ini, koperasi memberikan dana tersebut yang berasal dari dana APBD meskipun tidak terlalu besar namun koperasi berhak menentukan sesuai sasaran. Sehingga untuk efektifnya pelaksanaan program pinjaman modal kredit bergulir perlu dibangun kerjasama dan koordinasi yang baik antara petugas pelaksana. Kerjasama adalah jalinan kerja diantara dua pihak atau lebih, yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kerjasama berfungsi untuk mengoptimalkan keterpaduan antar petugas/tim pelaksana sehingga diperoleh keserasian dan keselarasan dalam menyalurkan pinjaman kredit bergulir dari koperasi pada nelayan atau petambak yang telah berwirausaha. .

Konsep pemberian modal usaha ini pada dasarnya dikembangkan dari konsep model management strategi AIDA khususnya adalah *Attention* dan *Action*. Tindakan yang dilakukan dengan memberikan modal semata-mata adalah keinginan pemerintah memiliki masyarakat mandiri dalam menghasilkan peningkatan pendapatan ekonomi. Tindakan nyatanya dilakukan melalui sistem kredit cicilan modal usaha yang bisa menumbuhkan keinginan dalam diri nelayan ataupun petambak.

c. Pengembangan Kelembagaan

Dalam pengembangan kelembagaan masyarakat nelayan disekitar pesisir kabupaten Sumenep dilakukan dengan cara membentuk kelompok nelayan yang memiliki tujuan bersama sehingga membentuk sebuah organisasi yang terstruktur dengan dilengkapi dengan kepengurusan misalnya ketua bendahara dan anggota hal ini dilakukan agar dalam kelompok nelayan berjalan sistematis dan efisien. Kemudian adanya kerjasama kelembagaan antara kelompok nelayan dengan lembaga keuangan mikro baik bank maupun non bank. Hal yang dilakukan dalam menghubungkan antara masyarakat dengan sistem kredit pinjam meminjam melalui koperasi yang tentunya ada kerjasama dengan LKM formal bank diantaranya Badan Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BNI, mandiri unit mikro, Danamon Simpan Pinjam (DSP), dan BRI Unit, 2) melakukan kerjasama melalui LKM formal nonbank mencakup Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), koperasi (Koperasi Simpan Pinjam/KSP dan Koperasi Unit Desa/KUD), dan pegadaian, 3) LKM informal terdiri dari berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) serta berbagai bentuk kelompok lainnya.

Beberapa kerjasama dengan ketiga LKM tersebut digunakan sebagai mempermudah pengembangan usaha yang dijalankan oleh

kelompok nelayan kabupaten sumenep. Kerjasama itupun didukung oleh pemerintah setempat yang memiliki program minapolitan sehingga masyarakat pesisir yang terbentuk dalam kelompok nelayan dikabupaten Sumenep memiliki akses yang mudal dalam hal permodalan.

Hal ini senada dengan pernyataan Hutomo (2000) menjelaskan bahwa pengelolaan kelembagaan adalah pemerintah juga menghubungkan antara masarakat dengan jaringan kemitraan antara lembaga keuangan mikro dengan kalangan perbankan, pengembangan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro, Peningkatan dan pengembangan kemampuan para pengelola lembaga keuangan mikro adalah contoh program yang bisa di lakukan dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan mikro pedesaan.

Pengembangan kelembagaan ini sangat berhubungan dengan action (tindakan) pemerintah untuk meniptakan *Desire* (keinginan) masyarakat dalam hidup mandiri dan dapat meningkatkan pendapatannya sendiri. Melalui kerjasama dngan lembaga khususnya perbankan tentu akan memberikan ketertarikan tersendiri bagi masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan menjadi tidak sia-sia yaitu melalui penyediaan kerjasama bersama LKM maupun perbankan.

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Sarana dapat diartikan semua bentuk fasilitas yang dapat memberikan manfaat untuk proses kegiatan ekonomi masyarakat.

Sebagai salah satu Kabupaten di Madura pantai dengan potensi sumber daya laut yang besar di Kabupaten Sumenep, maka mayoritas penduduk Kabupaten Sumenep menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Melihat potensi yang besar dari sektor perikanan di Kabupaten Sumenep, maka Pemerintah Daerah membangun sarana Pelabuhan Perikanan yang terletak di Kabupaten Sumenep yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Yoeti (1996:344) bahwa prasarana merupakan fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ketersediaan pelabuhan jelas memastikan bahwa transportasi kapal laut bisa menjadi alat transportasi yang dapat membawa para wisatawan dari tempat dimana ia tinggal, ke tempat atau Negara yang merupakan daerah tujuan wisata.

Selanjutnya adalah terdapat Kelompok prasarana yang tergolong utilitas, maksudnya adalah kelompok prasaranan yang sifatnya sangat mendasar, yang termasuk dalam kelompok ini adalah penerangan listrik dan persediaan air minum. Hal ini ditunjukkan hasil olah data penelitian bahwa Ketersediaan listrik yang sudah ada listrik dengan kapasitas daya mencapai 53.099.102 VA. Kapasitas daya listrik ini cukup memadai mengingat kebutuhan listrik khusus untuk industri ATC hanya sebesar 33.000 VA. Selanjutnya ketersediaan air PDAM dengan potensi

produksi sebesar 6.868.864 m³, sementara tingkat konsumsi hanya mencapai 2.771.633 m³.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Minapolitan di Kabupaten Sumenep sendiri adalah berupa kegiatan sosial dan pembangunan sarana prasarana. Diantara sarana prasarana yang telah dibangun adalah jenis prasarana dasar lingkungan berupa prasarana jalan guna meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat.

Dalam tahapan Action yang paling pusat ini pemerintah haruslah sudah mengarah pada tindakan untuk masyarakat sendiri. Dalam tahapan action ini menjelaskan langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menginginkan untuk kebaikan progress pendapatan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah tindakan pengembangan sarana prasarana yang tentunya akan mendukung segala aktivitas kelautan masyarakat.

e. Penyedia Informasi Tepat Guna

Penggunaan teknologi sederhana/bersifat tradisional dalam proses penangkapan ikan serta pekerjaan yang tidak tetap, yang tergantung musim mengakibatkan tingkat pendapatan nelayan sangat rendah, sehingga nelayan di daerah ini memiliki kesejahteraan yang minim. Mengingat adanya keterbatasan dana serta kondisi yang tidak menentu maka nelayan juga memerlukan sebuah penyesuaian atas ketersediaan informasi tepat guna.

Mengingat betapa pentingnya sebuah ketersediaan informasi yang tepat guna maka Pemerintah Kabupaten Sumenep berupaya dengan maksimal mengembangkan sebuah informasi supaya tingkat produktivitas masyarakat semakin tinggi dan dapat dikelola dengan lebih baik lagi di sector ketepatan informasi. Sehingga sebuah kawasan minapolitan di Kabupaten Sumenep menjadi kawasan dengan program yang penuh rencana strategis.

Upaya pemerintah tersebut diwujudkan berupa penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro Kecil, dan dalam kebijakan tersebut dikemukakan antara lain tentang perlunya keberpihakan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro dalam berbagai bentuk seperti kemitraan, permodalan, pemasaran, teknologi, pencadangan usaha dan sebagainya. Upaya lain yang dilakukan adalah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Barat Nomor 412.32/K/1147/2013 tentang Alokasi Modal Usaha Ekonomi Mikro. Atas dasar kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pengembangan usaha kecil yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk strategi dan langkah konkrit, yang dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep sendiri.

Teknologi tepat guna ini diupayakan dalam menciptakan sebuah ketertarikan dan keinginan khusus bagi para masyarakat yang membutuhkan informasi baru. Tindakan pemerintah dalam mengembangkan teknologi tepat guna ini juga tidak semata-mata untuk

kepentingan pribadi namun justru memberi perhatian bagi masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi kelautan dan perikanan.

2. Faktor yang berpengaruh terhadap Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Program Minapolitan

Analisis faktor pendukung dan penghambat bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Program Minapolitan. Berikut ini akan diuraikan yaitu :

a. Faktor Pendukung

Dalam lingkup masyarakat pesisir kegiatan perekonomiannya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya laut. Kebanyakan dari masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai mata pencahariannya sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan. Dalam kaitannya mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu tidak terlepas dari wewenang pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan.

Berpijak pada aturan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka kewenangan dan kebijakan mengenai pembedayaan masyarakat oleh Pemerintah setempat menjadi dasar pelaksanaannya. Hal ini didasarkan pada banyaknya potensi alam yang ada di Kabupaten Sumenep sendiri mengenai hasil dari perikanan dan

kelautan. Dalam melakukan kegiatan perikanan dan kelautan tentunya ada beberapa hal yang mendukung yaitu Adanya anggaran melalui APBN yang disediakan oleh pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan melalui koperasi dan adanya komitmen dari Dinas dan instansi terkait untuk mensukseskan program pemberdayaan masyarakat Serta Keterlibatan dengan pihak lain.

Dengan demikian keseluruhan strategi tersebut diyakini sebagai upaya yang dapat memaksimalkan tingkat perekonomian masyarakat Kabupaten Sumenep sendiri. Hal ini senada dijelaskan oleh Suharto (2008:14-15) bahwa dibanyak negara yang menganut sistem negara kesejahteraan, kebijakan sosial diwujudkan kedalam berbagai program pemerintah melalui skema-skema perlindungan sosial (*sosial protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*sosial safety nets*).

b. Faktor Penghambat

Kesejahteraan merupakan rasa tenang yang dirasakan oleh masyarakat karena hajat hidup lahir batin rakyat telah terpenuhi. Kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal yang menyangkut tentang kesehatan, sandang, papan dan pangan. Kesejahteraan batin menyangkut tentang persepsi yang bersifat intelektual, emosional maupun spiritual yaitu rasa terlindungi dan

terpenuhinya hak-hak intelektual, emosional dan spiritual masyarakat (Garda Maeswara 2009 : 246).

Tujuan diadakannya program Minapolitan ini pada dasarnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan petambak. Namun, dalam pelaksanaannya tentunya akan ada banyak hambatan yang mempengaruhinya. Masih lemahnya koordinasi kerja dan komitmen dengan nelayan serta kurang optimalnya sosialisasi sehingga sulitnya membedakan antara pembudidaya dan penangkapan. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk tahapan sosialisasi belum berjalan secara efektif, karena sosialisasi dilaksanakan melalui media musyawarah. Kemudian adanya perubahan kebijakan atau kewenangan yang tiba-tiba membuat kewenangan yang baru justru menyulitkan pengembangan budidaya sendiri karena seharusnya pemberdayaan ini fokusnya ke masyarakat.

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa Pada faktor penghambat: (1) permasalahan yang dialami dalam implementasi program Minapolitan ialah terbatasnya akses terhadap sumber pemodal, (2) kemudian lemahnya koordinasi antar kelompok nelayan dan perwakilan pemerintah (Akbar Khamarullah. 2014 : 591-596).

Pada Kabupaten Sumenep sendiri kebijakan ini diolah dalam program pemerintah yaitu program Minapolitan. Berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan baik melalui kebijakan nasional maupun daerah berupaya untuk menjadikan

masyarakat diberdayakan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Menjadi sebuah permasalahan adalah bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ketika perbagai program pemberdayaan telah dilakukan akan tetapi tidak memberikan dampak signifikan yang tinggi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Hasil yang di capai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program minapolitan

Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan rakyat (Sjarief Widjaja 2013:10). Penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan atau kombinasi ketiga hal tersebut. Tujuan dari program minapolitan adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil, meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas sehingga memiliki daya saing tinggi, dan untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional (Akbar Khamarullah 2014 Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol2, No. 4:591-596).

Sebagai suatu program, minapolitan perlu diimplementasikan agar tujuan dari program tersebut dapat dicapai. Program minapolitan

merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk mengambil inisiatif dalam menetapkan sebuah prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi perlu dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat dipahami tentang apa yang seharusnya terjadi setelah program minapolitan tersebut berlaku atau dirumuskan (James E. Anderson 2003). Apabila telah diperoleh hasil atau outcomes dari implementasi kebijakan, akan dilakukan evaluasi sebagai tahapan akhir dari proses suatu kebijakan.

Hasil yang diperoleh dari adanya pelaksanaan program minapolitan adalah pertumbuhan ekonomi dimana bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sumenep memiliki potensi berbagai jenis hasil perikanan baik perairan laut beserta hasil olahannya maupun hasil dari pertambakan. Salah satunya adalah rumput laut yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Sumenep Jawa Timur ini. Sehingga hasil yang dicapai adalah memberikan pemahaman sederhana bagi para nelayan dalam mengembangkan usaha perikananannya bahwa sumber daya potensi laut rumput laut bisa dibudidayakan dengan berbagai macam ragam bentuknya.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi sesuai dengan pendapat para ahli dari aliran teori strukturalis. Hadi Prayitno dan Budi Santoso (1998:50) mengemukakan bahwa strategi pembangunan di negara berkembang akan lebih baik jika menggunakan strategi pembangunan berupa penciptaan lapangan kerja, reinvestasi, pemenuhan kebutuhan hidup pokok, pengembangan sumberdaya manusia,

mengutamakan sektor pertanian, mengembangkan sektor pedesaan terpadu dan penataan ekonomi nasional, sedangkan strategi pembangunan dalam era otonomi harus mengacu kepada berkembangnya otonomi daerah dan semakin meningkatnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, yang bermuara kepada tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya penduduk miskin dan desa tertinggal serta meningkatnya partisipasi aktif dari masyarakat.